Penulis:

Indrayanto, M.Pd.I., Ph.D.

PENGANTAR SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI PENDIDIKAN

Nexus Research Publishing

Pengantar Sosiologi dan Antropologi Pendidikan

Penulis: Indrayanto, M.Pd.I., Ph.D.

Penata letak: *Nexus Research Publishing*

Desain sampul: *Nexus Research Publishing*

Cetakan pertama : September 2026

Ukuran dan tebal : A5 (14,8 × 21 cm), cm + 97 halaman

ISBN : **[xxx-xxx-xxxx-xx-x]**

Dicetak oleh : **Project Mulya**

Hak Cipta © 2026 Nexus Research Publishing

Hak penerbitan pada Nexus Research Publishing

All Rights Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk dan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Diterbitkan oleh:

NEXUS RESEARCH PUBLISHING

BTN Idaman Permai Blok D No. 6

Curup Tengah, Rejang Lebong, Bengkulu 39138

Telepon: +62 882-1307-1965

Email: admin@nexuspublishing.id

www.nexuspublishing.id



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, buku ajar yang berjudul "Pengantar Sosiologi dan Antropologi Pendidikan" ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun sebagai salah satu upaya untuk menyediakan sumber belajar yang komprehensif bagi mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, khususnya Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) di Universitas Dharma Indonesia.

Pendidikan sebagai fenomena sosial dan kultural memiliki kompleksitas yang tidak dapat dipahami hanya melalui pendekatan psikologis semata. Oleh karena itu, buku ini hadir untuk membekali calon pendidik dengan perspektif sosiologis dan antropologis dalam memahami realitas pendidikan. Melalui kajian tentang paradigma sosiologi, pewarisan budaya, proses sosialisasi, perubahan sosial, modal sosial-budaya, kultur sekolah, isu-isu sosial kontemporer, hingga tantangan era global, diharapkan mahasiswa dapat memperoleh pemahaman yang holistik tentang peran dan fungsi pendidikan dalam masyarakat.

Penyusunan buku ini mengacu pada pendekatan teoretis yang dikembangkan oleh para tokoh sosiologi dan antropologi klasik maupun kontemporer, seperti Emile Durkheim, Max Weber, Karl Marx, Pierre Bourdieu, Clifford Geertz, serta George Ritzer. Namun demikian, buku ini tidak sekadar memaparkan teori-teori Barat secara dogmatis, melainkan berupaya mengintegrasikannya dengan kearifan lokal dan konteks keindonesiaan. Nilai-nilai seperti *Tri Hita Karana* di Bali, *Siri'* di Bugis, serta semangat gotong royong yang tumbuh di berbagai daerah di Nusantara, dihadirkan sebagai jembatan antara teori global dan realitas lokal.

Kekhasan buku ini terletak pada penyajiannya yang sistematis dan aplikatif. Setiap bab dilengkapi dengan peta konsep untuk memudahkan pemahaman, studi kasus untuk memperkaya analisis,

rangkuman sebagai penegasan materi, serta pertanyaan reflektif untuk mendorong mahasiswa berpikir kritis. Dengan demikian, buku ini tidak hanya berfungsi sebagai sumber teori, tetapi juga sebagai panduan untuk membaca dan menganalisis fenomena pendidikan yang terjadi di sekitar kita.

Ucapan terima kasih yang tulus kami sampaikan kepada berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyelesaian buku ini. Secara khusus, kami sampaikan apresiasi kepada:

1. Rektor dan jajaran pimpinan Universitas Dharma Indonesia yang telah memberikan dukungan dan fasilitasi dalam proses penulisan buku ajar ini.
2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan serta Ketua Program Studi PGSD yang senantiasa mendorong terciptanya bahan ajar yang berkualitas.
3. Para kolega dosen dan praktisi pendidikan yang telah memberikan masukan berharga dalam pengembangan substansi buku.
4. Mahasiswa PGSD Universitas Dharma Indonesia yang menjadi inspirasi dan motivasi utama dalam penyusunan buku ini.
5. Tim editorial yang telah bekerja keras dalam proses penyuntingan dan tata letak buku hingga terbit dengan baik.

Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Sosiologi dan Antropologi Pendidikan, serta menjadi bekal berharga bagi para calon pendidik dalam menjalankan tugas mulia mencerdaskan kehidupan bangsa.

Akhir kata, selamat membaca dan semoga ilmu yang terkandung dalam buku ini dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam upaya mewujudkan pendidikan yang bermutu, berkeadilan, dan berkarakter bagi generasi penerus bangsa.

Tangerang, Agustus 2026
Penulis

Indrayanto, M.Pd.I., Ph.D.

DAFTAR ISI

Cover Buku ..... **i**

Keterangan Buku ..... **ii**

Kata Pengantar ..... **iii**

Daftar Isi ..... **vi**

BAB 1: PENDIDIKAN DAN PARADIGMA SOSIOLOGI **1**

A. Definisi dan Objek Sosiologi Pendidikan 1

B. Tiga Paradigma Utama Sosiologi dalam Konteks Pendidikan (George Ritzer) 2

C. Teori Klasik tentang Pendidikan 4

D. Fungsi Manifes dan Laten Pendidikan (Robert K. Merton) 7

E. Pendidikan sebagai Agen Kontrol Sosial vs Agen Perubahan 8

F. Analisis Kebijakan Merdeka Belajar melalui Paradigma Fakta Sosial dan Definisi Sosial 9

Rangkuman 11

Pertanyaan Reflektif 12

BAB 2: PENDIDIKAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF ANTROPOLOGI **14**

A. Pengertian Antropologi dan Antropologi Pendidikan 15

B. Pendidikan sebagai Enkulturasi dan Akulturasi 16

C. Pendekatan Antropologi dalam Pendidikan (Antropologi Pendidikan) 17

D. Hakikat Manusia dalam Pendidikan 19

E. Nilai-nilai Budaya Lokal dalam Kurikulum 21

F. Konsep "Pendidikan Tanpa Sekolah" (Pendidikan Informal) 22

G. Relevansi Teori Antropologi Clifford Geertz ("Thick Description") untuk Menganalisis Perilaku di Sekolah 24

H. Studi Kasus: Etnografi Pola Belajar Santri di Pondok Pesantren Salafiyah dan Sekolah Umum Modern 27

Rangkuman 29

Pertanyaan Reflektif 31

BAB 3: SOSIALISASI DAN KEPRIBADIAN 33
Pendahuluan 33
1. Definisi Sosialisasi: Tahapan Sosialisasi Primer dan Sekunder 33
2. Teori Pembentukan Diri (The Looking Glass Self - C.H. Cooley) ... 34
3. Teori Mead (I and Me) 35
4. Kepribadian dalam Konteks Pendidikan: Pengaruh Pola Asuh 36
5. Sosialisasi Gender di Sekolah: Kurikulum Tersembunyi (Hidden Curriculum) 37
6. Peran Agen Sosialisasi: Keluarga, Sekolah, Teman Sebaya, dan Media Massa 38
Studi Kasus: Fenomena "Anak Mami" dan Kurangnya Kemandirian Siswa 40

BAB 4: PERUBAHAN SOSIAL DAN PENDIDIKAN 42
Pendahuluan 42
1. Teori Perubahan Sosial: Evolusionisme, Siklus, dan Konflik serta Implikasinya pada Kurikulum 42
2. Pendidikan sebagai Respons terhadap Perubahan 44
3. Pendidikan sebagai Penyebab Perubahan 45
4. Krisis Relevansi Pendidikan: Kesenjangan antara Kurikulum dan Kebutuhan Dunia Kerja 47
5. Digitalisasi Pendidikan sebagai Bentuk Perubahan Sosial 48
Studi Kasus: Transformasi Pembelajaran dari Tatap Muka menjadi Daring (Pasca Pandemi Covid-19) dan Dampaknya terhadap Interaksi Sosial Siswa 49

BAB 5: MODAL SOSIAL BUDAYA DALAM PENDIDIKAN 53
Pendahuluan 53
1. Konsep Modal Sosial (Pierre Bourdieu & James Coleman) 54
2. Konsep Modal Budaya (Bourdieu) 55
3. Reproduksi Kultural: Mengapa Anak dari Orang Tua Kaya Seringkali Lebih Berhasil di Sekolah? 57
4. Modal Sosial dalam Masyarakat Adat: Gotong Royong Membangun Sekolah 57

5. Strategi Mengatasi Keterbatasan Modal Budaya: Peran Guru dalam Memberikan Cultural Bridging 58
Studi Kasus: Fenomena "Anak Pejabat vs Anak Nelayan" dalam Persaingan Masuk Perguruan Tinggi Negeri 59

BAB 6: KULTUR SEKOLAH DAN MUTU PENDIDIKAN 62

Pendahuluan 62
1. Definisi Kultur Sekolah: Artefak Fisik, Nilai-nilai, dan Asumsi Dasar 62
2. Komponen Pembentuk Kultur Sekolah 64
3. Kultur Positif vs Kultur Toksik 66
4. Hubungan Kultur Sekolah dengan Mutu (Output) 67
5. Peran Hidden Curriculum (Kurikulum Tersembunyi) 69
Studi Kasus: Perbandingan Kultur Sekolah di Sekolah Alam (Bebas) dengan Sekolah Unggulan Berbasis Kedisiplinan Tinggi (Militeristik) . 70

BAB 7: ISU-ISU SOSIAL BUDAYA DALAM PENDIDIKAN 73

Pendahuluan 73
1. Pendidikan Multikultural: Mengelola Keberagaman Suku, Agama, dan Ras di dalam Kelas 73
2. Ketimpangan Pendidikan (Education Gap): Perbedaan Akses Mutu antara Sekolah di Daerah 3T dan Kota Besar 74
3. Perundungan (Bullying) dan Kekerasan di Sekolah: Analisis Sosiologis Relasi Kuasa dan Mekanisme Pencegahannya 75
4. Erosi Nilai Moral: Degradasi Sopan Santun dan Etika Komunikasi Akibat Gawai 77
5. Pendidikan Inklusif: Tantangan Mengintegrasikan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dalam Sistem Pendidikan Reguler 77
6. Politik Identitas dan Radikalisme: Deradikalisasi melalui Pembelajaran 79
Studi Kasus: Konflik Antar Pelajar yang Dipicu oleh Perbedaan Latar Belakang Organisasi Keagamaan di Sekolah Umum 79

BAB 8: TANTANGAN PENDIDIKAN DI ERA GLOBAL .. 81

Pendahuluan 81

1. Globalisasi dan Standar Pendidikan: Pengaruh PISA terhadap Kebijakan Kurikulum di Indonesia 81
2. Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0: Keterampilan Abad 21 (4C) .. 82
3. Tantangan Profesi Guru di Era Digital: Guru vs Kecerdasan Buatan (AI) 84
4. Kompetisi Global vs Lokal (Glokalisasi): Mempertahankan Jati Diri Budaya Indonesia 84
5. Krisis Mental dan Kesejahteraan Psikologis 85
6. Kebijakan Merdeka Belajar sebagai Respons Global 86
Studi Kasus: Dampak Penggunaan ChatGPT/AI terhadap Kemampuan Menulis dan Berpikir Kritis Siswa di Indonesia 87
Daftar Pustaka **89**
Tentang Penulis **96**



BAB 1

PENDIDIKAN DAN PARADIGMA SOSIOLOGI

Peta Konsep

Bab ini menyajikan kerangka berpikir sosiologis dalam memahami pendidikan sebagai fenomena sosial. Pembahasan dimulai dari definisi dan objek kajian sosiologi pendidikan, dilanjutkan dengan tiga paradigma utama sosiologi menurut George Ritzer, serta teori-teori klasik tentang pendidikan dari Emile Durkheim, Karl Marx, dan Max Weber. Bab ini juga mengulas fungsi manifes dan laten pendidikan menurut Robert K. Merton, serta peran ganda pendidikan sebagai agen kontrol sosial sekaligus agen perubahan. Pemahaman terhadap kerangka teoretis ini menjadi fondasi bagi analisis kebijakan pendidikan, termasuk kebijakan Merdeka Belajar di Indonesia.

A. Definisi dan Objek Sosiologi Pendidikan

Sosiologi pendidikan merupakan cabang ilmu sosiologi yang secara khusus mengkaji hubungan timbal balik antara pendidikan dan masyarakat. Berbeda dengan psikologi pendidikan yang memusatkan perhatian pada proses belajar individu, sosiologi pendidikan menempatkan fokus pada fenomena pendidikan sebagai realitas sosial

yang terbentuk dari interaksi antarindividu, kelompok, dan institusi dalam masyarakat.

Objek formal sosiologi pendidikan adalah pola-pola interaksi sosial, struktur sosial, dan proses sosial yang terjadi dalam institusi pendidikan serta kaitannya dengan sistem sosial yang lebih luas. Dengan demikian, sosiologi pendidikan tidak sekadar mempelajari apa yang terjadi di dalam kelas, melainkan bagaimana sekolah sebagai institusi sosial berfungsi dalam mempertahankan, mereproduksi, atau mengubah tatanan sosial. Batas tegas antara pendekatan psikologis dan sosiologis dalam pendidikan terletak pada unit analisisnya: psikologi pendidikan memandang siswa sebagai individu dengan dinamika internalnya, sedangkan sosiologi pendidikan memandang siswa sebagai bagian dari sistem sosial yang dipengaruhi oleh struktur dan budaya masyarakat.

B. Tiga Paradigma Utama Sosiologi dalam Konteks Pendidikan (George Ritzer)

George Ritzer (2011) mengklasifikasikan teori sosiologi ke dalam tiga paradigma utama yang masing-masing menawarkan cara pandang berbeda dalam memahami realitas sosial, termasuk realitas pendidikan. Ketiga paradigma tersebut adalah Paradigma Fakta Sosial, Paradigma Definisi Sosial, dan Paradigma Perilaku Sosial.

1. Paradigma Fakta Sosial (Emile Durkheim)

Paradigma fakta sosial memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang bersifat objektif, berada di luar individu, dan memiliki kekuatan memaksa terhadap tindakan individu. Dalam konteks pendidikan, sekolah dipahami sebagai institusi moral yang berfungsi membentuk solidaritas sosial. Pandangan ini berakar pada pemikiran Emile Durkheim yang menekankan bahwa pendidikan merupakan "cara masyarakat mempertahankan eksistensinya" melalui pewarisan nilai-nilai kolektif kepada generasi baru (Durkheim, 1956).

Sekolah, dalam perspektif ini, berfungsi sebagaimana agama dalam masyarakat primitif, yaitu sebagai lembaga sosialisasi yang menanamkan kesadaran kolektif. Golovashina (2024) mengemukakan bahwa Durkheim meyakini pendidikan warga negara yang efektif memerlukan penekanan pada tiga komponen: (1) transmisi pengetahuan kolektif tentang masa lalu dan pengalaman generasi sebelumnya; (2) penanaman rasa hormat terhadap otoritas yang sah dan pengaruh moralnya; serta (3) penanaman nilai-nilai bersama kepada siswa. Durkheim juga menekankan peran negara sebagai aktor netral yang harus berada di atas konflik antarkelompok dengan memberikan perhatian pada morfologi sosial masyarakat (Golovashina, 2024).

2. Paradigma Definisi Sosial (Max Weber dan Herbert Blumer)

Berbeda dengan paradigma fakta sosial, paradigma definisi sosial memandang realitas sosial sebagai konstruksi subjektif yang terbentuk melalui proses interpretasi dan pemberian makna oleh aktor sosial. Pendekatan ini, yang dikembangkan oleh Max Weber dan kemudian diperluas oleh Herbert Blumer melalui teori interaksionisme simbolik, menekankan pentingnya memahami makna di balik tindakan sosial.

Dalam konteks pendidikan, paradigma ini menaruh perhatian pada bagaimana guru dan siswa saling menginterpretasikan tindakan satu sama lain di dalam kelas. Interaksi guru-murid bukan sekadar proses transfer pengetahuan, melainkan proses negosiasi makna yang melibatkan simbol-simbol verbal dan non-verbal. Misalnya, sapaan guru, intonasi suara, atau bahasa tubuh di kelas memiliki makna tertentu yang diinterpretasikan oleh siswa dan mempengaruhi cara mereka merespons. Pendekatan ini relevan untuk memahami dinamika kelas yang beragam, di mana latar belakang budaya siswa mempengaruhi cara mereka memaknai pesan-pesan yang disampaikan guru (Blumer, 1969).

3. Paradigma Perilaku Sosial (B.F. Skinner dan George Homans)

Paradigma perilaku sosial memandang realitas sosial sebagai hasil dari interaksi stimulus-respons yang dapat diamati secara empiris. Dipelopori oleh B.F. Skinner dalam psikologi dan George Homans dalam sosiologi, paradigma ini menekankan bahwa perilaku manusia ditentukan oleh konsekuensi yang menyertainya.

Dalam pendidikan, paradigma ini tercermin dalam kebijakan pemberian hadiah dan hukuman sebagai instrumen pembentukan perilaku siswa. Sistem penghargaan seperti pemberian nilai, piagam, atau pujian, serta sistem hukuman seperti teguran atau sanksi, dipahami sebagai mekanisme pengondisian yang membentuk disiplin dan motivasi belajar. Kebijakan pendidikan yang berbasis pada sistem akuntabilitas dan penilaian kinerja juga dapat dianalisis melalui lensa paradigma ini, di mana perilaku guru dan siswa diarahkan oleh sistem insentif dan disinsentif yang berlaku (Homans, 1961).

C. Teori Klasik tentang Pendidikan

1. Emile Durkheim: Pendidikan sebagai Pewarisan Nilai Kolektif

Bagi Durkheim, pendidikan memiliki fungsi moral yang fundamental bagi kelangsungan masyarakat. Pendidikan adalah "cara masyarakat mempertahankan eksistensinya" karena melalui pendidikan, nilai-nilai dan norma-norma kolektif ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya (Durkheim, 1956). Sekolah berperan sebagai "agensi moral" yang mengajarkan disiplin, keterikatan pada kelompok, dan otonomi tiga elemen yang menurut Durkheim merupakan fondasi moralitas modern.

Durkheim meyakini bahwa sekolah memiliki fungsi yang serupa dengan agama dalam masyarakat tradisional, yaitu menciptakan solidaritas dan integrasi sosial (Golovashina, 2024). Namun, karena masyarakat modern bersifat pluralistik, sekolah harus

mengajarkan nilai-nilai yang dapat diterima oleh semua kelompok tanpa memihak pada kepentingan kelompok tertentu. Oleh karena itu, Durkheim menekankan pentingnya negara sebagai aktor netral dalam merumuskan kurikulum yang mencerminkan nilai-nilai kolektif masyarakat, bukan nilai-nilai kelompok dominan (Golovashina, 2024). Pandangan ini menjadi dasar bagi pengembangan pendidikan kewarganegaraan di berbagai negara.

2. Karl Marx: Pendidikan sebagai Reproduksi Kelas Dominan

Karl Marx memandang pendidikan dalam kerangka analisis kelas dan reproduksi relasi produksi. Bagi Marx, sekolah dalam masyarakat kapitalis bukanlah institusi netral yang memberikan kesempatan yang sama bagi semua, melainkan alat reproduksi kelas dominan yang melanggengkan ketimpangan sosial (Marx & Engels, 1970). Sekolah berfungsi untuk mensosialisasikan individu ke dalam berbagai posisi dalam struktur kelas dan memperkuat pemisahan kelas pekerja dari alat-alat produksi.

Dalam perspektif Marxian, kurikulum dan organisasi sekolah mencerminkan kepentingan kelas kapitalis. Pendidikan tidak sekadar mentransmisikan pengetahuan, tetapi juga mendistribusikannya secara tidak merata kepada kelompok sosial yang berbeda, sehingga berkontribusi pada reproduksi hubungan sosial yang timpang (Allman, 2013). Sekolah dipandang sebagai institusi anti-kelas pekerja karena memperkuat pemisahan kelas pekerja dari alat produksi. Namun, analisis Marx juga mengakui adanya kontradiksi dan perlawanan dalam proses reproduksi, yang membuka ruang bagi guru dan siswa untuk menantang bentuk-bentuk pendidikan yang ada (Allman, 2013; Anyon, 1980).

Selain sebagai alat reproduksi ideologi negara, pendidikan dalam pandangan Marx juga berperan dalam produksi tenaga kerja (*labour power*). Hal ini berarti bahwa sekolah mempersiapkan individu untuk berfungsi dalam sistem produksi kapitalis dengan membekali

mereka dengan keterampilan yang diperlukan dan, yang tak kalah penting, dengan sikap kepatuhan dan disiplin yang dibutuhkan di tempat kerja (Allman, 2013). Dengan demikian, analisis Marx tentang pendidikan tetap relevan untuk memahami kesenjangan akses dan mutu pendidikan di era kontemporer.

3. Max Weber: Birokrasi dalam Sistem Pendidikan Modern

Max Weber memberikan sumbangan penting dalam memahami pendidikan modern melalui analisisnya tentang birokrasi dan rasionalisasi. Weber mengamati bahwa pendidikan modern ditandai oleh proses birokratisasi yang semakin intensif, di mana sekolah beroperasi berdasarkan aturan-aturan formal, hierarki yang jelas, dan prosedur yang terstandarisasi (Weber, 1947). Bagi Weber, sekolah modern memiliki "ideal pendidikan" yang melahirkan birokrat, bukan lagi "elit terdidik" dari masa lampau (Madan, 2014).

Sistem birokrasi dalam pendidikan menurut Weber memiliki ciri-ciri: (1) pembagian tugas yang jelas dan spesialisasi; (2) hierarki kewenangan yang terstruktur; (3) aturan tertulis yang mengatur operasional; (4) impersonalitas dalam hubungan; dan (5) rekrutmen berdasarkan kualifikasi teknis (Weber, 1947). Birokrasi mengandalkan pendidikan yang menekankan impersonalitas dan hubungan berdasarkan prinsip dan aturan umum, bukan pada hubungan personal seperti dalam pendidikan tradisional yang berbasis karisma atau tradisi (Madan, 2014).

Penelitian terkini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip birokrasi Weber, seperti aturan rasional, pembagian tugas, dan hierarki, tetap relevan dalam organisasi pendidikan modern. Namun, pengaruhnya dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti fleksibilitas, inovasi, dan partisipasi (Suryadi, 2025). Teori Weber tentang otoritas dan kontrol membantu memahami bagaimana kekuasaan berfungsi dalam institusi pendidikan dan bagaimana dinamika birokrasi mempengaruhi otonomi guru dan partisipasi siswa.

D. Fungsi Manifes dan Laten Pendidikan (Robert K. Merton)

Robert K. Merton (1968) mengembangkan konsep fungsi manifes dan fungsi laten untuk menganalisis konsekuensi dari tindakan atau institusi sosial. Fungsi manifes adalah fungsi yang disadari dan diharapkan oleh pelaku sosial, sedangkan fungsi laten adalah fungsi yang tidak disadari atau tidak diharapkan.

Dalam konteks pendidikan, fungsi manifes yang secara umum diakui antara lain: (1) transmisi pengetahuan dan keterampilan akademik; (2) persiapan tenaga kerja; (3) sosialisasi nilai-nilai dan norma-norma; serta (4) pengembangan potensi individu. Fungsi-fungsi ini secara eksplisit dinyatakan dalam tujuan pendidikan nasional dan menjadi dasar perumusan kebijakan pendidikan.

Sementara itu, fungsi laten pendidikan mencakup konsekuensi-konsekuensi yang tidak secara sadar dikehendaki namun hadir sebagai efek samping dari operasi institusi pendidikan. Merton (1968) mengidentifikasi beberapa fungsi laten pendidikan, antara lain: (1) pengembangan dan pemeliharaan hierarki kelas; (2) pembentukan jaringan sosial (*social networking*) di antara siswa; (3) fungsi "penyimpanan" (*custodial function*) yang membuat anak-anak berada di sekolah sehingga orang tua dapat bekerja; dan (4) pembentukan pasangan hidup melalui interaksi antarsiswa (Merton, 1968).

Penting untuk dicatat bahwa fungsi laten dapat bersifat positif maupun negatif. Fungsi laten yang negatif disebut sebagai disfungsi. Misalnya, sistem pendidikan yang secara tidak sengaja memperkuat ketimpangan sosial merupakan disfungsi dari pendidikan, meskipun hal ini seringkali tidak disadari oleh para pembuat kebijakan (Merton, 1968). Pemahaman tentang fungsi laten membantu para pendidik dan pengambil kebijakan untuk lebih kritis terhadap dampak-dampak tidak langsung dari kebijakan pendidikan yang mereka rancang (American Sociological Association, 2023).

E. Pendidikan sebagai Agen Kontrol Sosial vs Agen Perubahan

Pendidikan memiliki peran ganda yang tampaknya paradoksal: di satu sisi berfungsi sebagai agen kontrol sosial yang mempertahankan tatanan yang ada, dan di sisi lain sebagai agen perubahan yang mendorong transformasi sosial.

1. Pendidikan sebagai Agen Kontrol Sosial

Sebagai agen kontrol sosial, pendidikan berfungsi untuk menanamkan kepatuhan terhadap norma, nilai, dan aturan yang berlaku dalam masyarakat. Melalui kurikulum, disiplin sekolah, dan *hidden curriculum*, siswa diajarkan untuk menghormati otoritas, mematuhi aturan, dan menerima struktur sosial yang ada. Fungsi ini sejalan dengan pandangan Durkheim tentang pendidikan sebagai institusi moral dan pandangan Marx tentang pendidikan sebagai alat reproduksi (Golovashina, 2024; Allman, 2013).

Dalam konteks Indonesia, fungsi kontrol sosial pendidikan tercermin dalam penanaman nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila sebagai landasan ideologis. Sekolah juga berfungsi untuk menanamkan disiplin dan kepatuhan yang diperlukan dalam masyarakat modern yang terorganisasi secara birokratis (Madan, 2014).

2. Pendidikan sebagai Agen Perubahan

Di sisi lain, pendidikan juga berperan sebagai agen perubahan sosial. Sekolah dapat menjadi wahana bagi munculnya pemikiran kritis, inovasi, dan gerakan sosial yang menantang status quo. Ki Hajar Dewantara, misalnya, memandang pendidikan sebagai alat untuk membebaskan bangsa dari penjajahan dan membangun kesadaran nasional. Dalam pemikiran Dewantara, pendidikan seharusnya memerdekakan manusia secara utuh, baik secara fisik, mental, maupun spiritual (Dewantara, 1977).

Peran ganda pendidikan ini menimbulkan tegangan yang terus-menerus. Di satu pihak, negara dan kelompok dominan menginginkan pendidikan berfungsi sebagai alat reproduksi dan kontrol sosial. Di pihak lain, ada tuntutan agar pendidikan menjadi instrumen emansipasi dan transformasi. Ketegangan ini terlihat jelas dalam berbagai perdebatan kebijakan pendidikan, termasuk dalam implementasi kebijakan Merdeka Belajar di Indonesia.

F. Analisis Kebijakan Merdeka Belajar melalui Paradigma Fakta Sosial dan Definisi Sosial

Kebijakan Merdeka Belajar yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi merupakan salah satu reformasi pendidikan paling signifikan di Indonesia dalam dekade terakhir. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas dan otonomi yang lebih besar kepada sekolah dan guru dalam mengelola proses pembelajaran, serta menggeser fokus dari penilaian berbasis ujian menuju asesmen yang lebih holistik (Kemendikbudristek, 2024). Analisis kebijakan ini dapat dilakukan dengan menggunakan dua paradigma sosiologi yang telah dibahas: paradigma fakta sosial dan paradigma definisi sosial.

1. Analisis dengan Paradigma Fakta Sosial

Dari perspektif paradigma fakta sosial, kebijakan Merdeka Belajar dapat dipahami sebagai upaya untuk mengubah struktur dan fungsi institusi pendidikan sebagai fakta sosial. Kebijakan ini merupakan respons terhadap realitas objektif berupa rendahnya kualitas pendidikan Indonesia yang terukur dalam berbagai indeks internasional, seperti Programme for International Student Assessment (PISA) (OECD, 2019).

Sebagaimana dicatat dalam sejumlah penelitian, implementasi kebijakan Merdeka Belajar menghadapi berbagai tantangan struktural. Sumarno dkk. (2024) menyoroti adanya kesenjangan antara perencanaan dan implementasi kebijakan yang disebabkan oleh faktor

sumber daya manusia yang belum memadai, termasuk kompetensi guru dan kepala sekolah. Penelitian oleh Maisaroh dkk. (2026) bahkan mengkritisi bahwa implementasi Merdeka Belajar melalui platform digital justru menimbulkan bentuk-bentuk kontrol dan standardisasi baru yang mengikis nilai-nilai pedagogi lokal, seperti *ngeli* (kedalaman yang berorientasi proses) dan *olah rasa* (penghalusan emosi) yang dijunjung tinggi dalam tradisi pendidikan Jawa dan pesantren.

Kebijakan Merdeka Belajar juga dapat dianalisis sebagai respons terhadap perubahan struktur sosial yang lebih luas, seperti revolusi industri 4.0 dan transformasi digital. Dalam hal ini, kebijakan tersebut merupakan fakta sosial yang lahir dari tuntutan objektif zaman dan berfungsi untuk mempertahankan eksistensi sistem pendidikan nasional di tengah persaingan global.

2. Analisis dengan Paradigma Definisi Sosial

Dari perspektif paradigma definisi sosial, kebijakan Merdeka Belajar dipahami sebagai produk dari proses interpretasi dan negosiasi makna di antara para aktor yang terlibat. Kebijakan ini bukanlah sekadar dokumen teknis, melainkan konstruksi sosial yang sarat dengan nilai dan asumsi tentang apa itu pendidikan yang baik.

Penelitian oleh Kurniawati (2026) menunjukkan bahwa kebijakan Merdeka Belajar mengandung nilai-nilai emansipatoris dalam mendorong otonomi pedagogis dan pembelajaran yang kontekstual. Namun, kebijakan ini juga menunjukkan ketegangan antara kebebasan pendidikan dan kecenderungan teknokratis yang dapat mereduksi pendidikan menjadi fungsi instrumental semata. Dengan kata lain, makna "Merdeka Belajar" ditafsirkan secara berbeda oleh para pemangku kepentingan: sebagian melihatnya sebagai pembebasan dari birokrasi yang kaku, sementara yang lain mengkhawatirkannya sebagai bentuk standarisasi baru yang lebih halus (Kurniawati, 2026).

Penelitian lain menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada bagaimana guru, kepala sekolah,

dan orang tua menginterpretasikan dan memberikan makna pada kebijakan tersebut. Di tingkat sekolah, makna "Merdeka Belajar" dinegosiasikan melalui interaksi sehari-hari antara guru dan siswa, yang melibatkan tafsir-tafsir subjektif tentang kebebasan, tanggung jawab, dan pembelajaran yang bermakna (Suryadi, 2025). Dalam perspektif ini, kebijakan pendidikan tidak pernah netral; ia selalu diinterpretasikan dan dimaknai ulang oleh aktor-aktor di tingkat lokal.

Rangkuman

Bab ini telah menguraikan landasan teoretis sosiologi pendidikan sebagai kerangka untuk memahami fenomena pendidikan secara holistik. Beberapa poin penting yang dapat dirangkum adalah:

1. Sosiologi pendidikan memiliki objek kajian yang berbeda dengan psikologi pendidikan: sosiologi pendidikan memfokuskan pada pola interaksi, struktur, dan proses sosial dalam institusi pendidikan serta kaitannya dengan masyarakat luas.
2. Tiga paradigma utama sosiologi menurut George Ritzer masing-masing menawarkan sudut pandang yang berbeda: paradigma fakta sosial menekankan realitas objektif dan fungsi integratif pendidikan; paradigma definisi sosial menekankan makna subjektif dan proses interpretasi dalam interaksi pendidikan; paradigma perilaku sosial menekankan pada stimulus-respons dan sistem hadiah-hukuman dalam kebijakan pendidikan.
3. Teori klasik tentang pendidikan dari Durkheim, Marx, dan Weber tetap relevan untuk menganalisis pendidikan kontemporer. Durkheim menekankan fungsi moral dan integratif pendidikan; Marx menyoroti peran pendidikan dalam reproduksi kelas dan ketimpangan; Weber mengamati proses birokratisasi dan rasionalisasi dalam sistem pendidikan modern.
4. Konsep fungsi manifes dan fungsi laten dari Merton membantu memahami konsekuensi yang disadari dan tidak

disadari dari institusi pendidikan, termasuk dampak pendidikan terhadap pembentukan hierarki sosial.

5. Peran ganda pendidikan sebagai agen kontrol sosial dan agen perubahan menimbulkan tegangan yang terus-menerus antara fungsi reproduksi dan fungsi transformatif pendidikan.
6. Kebijakan Merdeka Belajar dapat dianalisis secara mendalam dengan menggunakan paradigma fakta sosial dan definisi sosial, yang menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak hanya merupakan respons terhadap tuntutan struktural, tetapi juga merupakan produk dari proses interpretasi dan negosiasi makna di antara para pemangku kepentingan.

Pertanyaan Reflektif

1. Dalam pengalaman Anda sebagai mahasiswa atau calon pendidik, bagaimana Anda melihat fungsi manifes dan laten dari sistem pendidikan yang pernah Anda jalani? Adakah fungsi laten yang tidak pernah Anda sadari sebelumnya?
2. Menurut Anda, sejauh mana kebijakan Merdeka Belajar berhasil menggeser paradigma pendidikan dari kontrol sosial menuju agen perubahan? Bukti apa yang Anda lihat di lingkungan sekitar Anda?
3. Di antara tiga paradigma yang dikemukakan oleh Ritzer, paradigma manakah yang menurut Anda paling relevan untuk menganalisis tantangan pendidikan di Indonesia saat ini? Jelaskan alasan Anda.
4. Bagaimana pandangan Durkheim tentang sekolah sebagai "institusi moral" dapat diterapkan dalam konteks pendidikan multikultural di Indonesia yang memiliki keberagaman suku, agama, dan budaya?
5. Refleksikan pengalaman belajar Anda: apakah Anda lebih sering mengalami pendidikan sebagai proses pembentukan kepribadian yang merdeka (sejalan dengan pandangan Ki Hajar Dewantara) atau sebagai proses kepatuhan terhadap sistem

birokrasi (sejalan dengan kritik Weber)? Bagaimana hal itu mempengaruhi cara Anda belajar?



BAB 2

PENDIDIKAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF ANTROPOLOGI

Peta Konsep

Bab ini mengantarkan pembaca pada pemahaman tentang pendidikan sebagai proses pewarisan budaya dan pembentukan manusia seutuhnya dari sudut pandang antropologi. Pembahasan diawali dengan pengertian antropologi dan antropologi pendidikan, kemudian dilanjutkan dengan konsep pendidikan sebagai enkulturasi dan akulturasi, pendekatan-pendekatan antropologi dalam Pendidikan termasuk pengertian etnografi pendidikan—serta hakikat manusia sebagai makhluk yang harus dididik (*Homo Educandum*) dan makhluk sosial (*Homo Socius*). Bab ini juga mengulas nilai-nilai budaya lokal dalam kurikulum, konsep pendidikan informal di masyarakat adat, serta relevansi teori "Thick Description" Clifford Geertz untuk menganalisis perilaku di sekolah. Pemahaman terhadap kerangka antropologis ini menjadi fondasi bagi analisis etnografi tentang pola belajar di pesantren salafiyah dibandingkan dengan sekolah umum modern.

A. Pengertian Antropologi dan Antropologi Pendidikan

1. Pengertian Antropologi

Antropologi merupakan salah satu cabang ilmu sosial yang mempelajari budaya masyarakat secara holistik. Ilmu ini lahir dari ketertarikan orang-orang Eropa terhadap perbedaan ciri-ciri fisik, adat istiadat, dan budaya yang mereka temui di berbagai belahan dunia (Ritzer, 2011). Antropologi memandang manusia sebagai makhluk biologis sekaligus makhluk sosial, sehingga kajiannya mencakup aspek fisik, budaya, dan perilaku manusia dalam konteks kemasyarakatan. Secara lebih spesifik, antropologi memusatkan perhatian pada penduduk sebagai kesatuan masyarakat yang tinggal di wilayah yang sama, dengan segala kompleksitas kehidupan sosial dan budayanya (Ritzer, 2011).

2. Pengertian Antropologi Pendidikan

Antropologi pendidikan merupakan penelaahan akademis tentang sistem pendidikan dari sudut pandang budaya (Wilcox, 1982). Bidang ini merupakan generalisasi tentang manusia dan perilakunya ketika berhubungan dengan fakta pendidikan (Wilcox, 1982). Sebagai salah satu spesialisasi termuda dalam antropologi, antropologi pendidikan dianggap dapat berdiri sendiri sebagai cabang spesialisasi yang memiliki jangkar akademis yang kuat (Wilcox, 1982).

Fokus utama antropologi pendidikan adalah pada pendidikan, tetapi pendekatan yang digunakan lebih berfokus pada aspek budaya, baik pada pendidikan formal maupun informal (Wilcox, 1982). Beberapa topik yang menjadi perhatian bidang ini antara lain pendidikan multikultural, pluralisme pendidikan, pedagogi yang sesuai dengan budaya, serta metode pembelajaran dan bersosialisasi yang cocok dengan konteks budaya tertentu (Wilcox, 1982). Antropologi pendidikan juga tertarik pada pendidikan di komunitas-komunitas yang berada di pinggiran struktur sosial, politik, dan ekonomi

masyarakat yang lebih besar, yang sering kali mengalami ketidakadilan, ketidaksetaraan, dan diskriminasi (Wilcox, 1982).

Penting untuk dipahami bahwa kajian antropologi pendidikan tidak bertujuan menghasilkan antropolog, melainkan menambah wawasan pengetahuan tentang pendidikan melalui perspektif budaya (Wilcox, 1982). Dengan kata lain, antropologi pendidikan merupakan alat telaah terhadap praktik-praktik pendidikan di masyarakat tertentu atau masyarakat secara umum, yang memungkinkan kita untuk memahami bagaimana konteks budaya membentuk proses dan hasil pendidikan (Wilcox, 1982).

B. Pendidikan sebagai Enkulturasi dan Akulturasi

Dalam perspektif antropologi, pendidikan dipahami sebagai proses pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Proses ini dikenal dengan istilah enkulturasi, yaitu proses di mana individu mempelajari dan menginternalisasi nilai-nilai, norma, dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakatnya. Diktum paling terkenal dalam antropologi pendidikan adalah bahwa fokus bidang ini adalah pada transmisi budaya (Wilcox, 1982). Transmisi budaya melibatkan transfer identitas budaya dari satu generasi ke generasi lainnya—yang dikenal sebagai enkulturasi—serta transfer identitas antar budaya, yang dikenal sebagai akulturasi (Demirdağ, 2025).

Demirdağ (2025) menegaskan bahwa budaya merupakan prosedur pembelajaran yang efektif dalam proses adaptasi manusia terhadap lingkungan, karena budaya adalah seperangkat perilaku bersama yang dipelajari dan bukan bersifat naluriah. Pendidikan formal di sekolah berfungsi sebagai institusi yang mentransmisikan nilai-nilai budaya secara sistematis dan terstruktur kepada generasi baru (Demirdağ, 2025).

Sejalan dengan itu, Hamid dkk. (2025) mengemukakan bahwa urgensi kajian pendidikan nonformal muncul dari tekanan modernisasi dan disrupsi digital yang mengancam kelestarian pengetahuan lokal. Pendidikan nonformal berperan sebagai benteng

terakhir bagi proses enkulturasi dan pembentukan identitas di tengah erosi budaya (Hamid et al., 2025). Temuan penelitian menunjukkan bahwa enkulturasi merupakan proses yang bersifat negosiatif dan selektif, yang didorong oleh peran generasi muda. Namun, kehadiran relasi kuasa yang asimetris, termasuk hegemoni senior dan marginalisasi berbasis gender, mengakibatkan ketidaksetaraan struktural dalam proses enkulturasi (Hamid et al., 2025).

Akulturasi, di sisi lain, merujuk pada proses penerimaan unsur-unsur budaya luar yang kemudian diadaptasi ke dalam budaya lokal tanpa menghilangkan identitas asli. Dalam konteks pendidikan, akulturasi terjadi ketika sekolah mengadopsi metode atau kurikulum dari sistem pendidikan lain, tetapi tetap mempertahankan nilai-nilai budaya setempat. Demirdağ (2025) menjelaskan bahwa perubahan budaya dan sosialisasi dalam masyarakat modern membawa konstruksi makna baru yang menuntut pengkajian ulang terhadap konsep-konsep tersebut. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pelestarian budaya, tetapi juga sebagai jembatan bagi dialog antarbudaya (Demirdağ, 2025).

C. Pendekatan Antropologi dalam Pendidikan (Antropologi Pendidikan)

Antropologi pendidikan merupakan cabang ilmu yang mengkaji proses pendidikan dalam konteks budaya. Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami latar belakang budaya peserta didik, guru, dan masyarakat sekitar sekolah untuk merancang pengalaman belajar yang lebih relevan dan efektif.

1. Pengertian Etnografi dan Etnografi Pendidikan

Etnografi secara etimologis berasal dari kata Yunani *ethnos* (bangsa/rakyat) dan *graphein* (menulis), yang berarti "menulis tentang bangsa" atau "menggambarkan suatu kelompok masyarakat" (Ritzer, 2011). Etnografi dapat dipahami sebagai 'produk' sekaligus sebagai 'metode'. Sebagai produk, etnografi adalah deskripsi

dari suatu komunitas atau teks yang menggambarkan kehidupan dan budaya suatu kelompok masyarakat. Sebagai metode, etnografi adalah cara untuk memahami suatu komunitas melalui aktivitas pengamatan terlibat (*participant observation*) dalam periode yang panjang (Ritzer, 2011).

Etnografi merupakan metode yang dikembangkan dalam bidang antropologi yang berupa pelukisan dan analisis tentang kebudayaan suatu masyarakat atau suku bangsa (Wilcox, 1982). Metode ini menjadi sebuah seni untuk mengamati, mencatat, dan mengabadikan keseharian dari sebuah komunitas dalam kurun waktu tertentu (Wilcox, 1982). Etnografi menggunakan berbagai metode kualitatif termasuk pendekatan sensorik, visual, dan kreatif untuk membenamkan diri dan memahami budaya pendidikan (Ritzer, 2011).

Etnografi pendidikan adalah penerapan metode etnografi untuk memahami proses pendidikan dalam setting budaya tertentu. Ketika ditarik dalam konteks pendidikan, etnografi menggambarkan bagaimana budaya pendidikan dimunculkan dalam konteks yang beragam (Wilcox, 1982). Etnografi memungkinkan kita untuk bisa mengenali keragaman konteks di mana proses belajar terjadi. Peneliti etnografi pendidikan menggabungkan metodologi penelitian partisipatif, keterlibatan teoretis, dan genre penulisan yang deskriptif kaya untuk menggambarkan kompleksitas pembelajaran sehari-hari dalam segala bentuknya (Ritzer, 2011).

Ciri khas etnografi pendidikan adalah perhatian yang cermat terhadap hal-hal sehari-hari, yang tidak terduga, dan yang implisit. Peneliti menyoroti peran pendidikan dalam menghasilkan dan mereproduksi ketidaksetaraan, di saat yang sama menawarkan kemungkinan-kemungkinan emansipatif (Wilcox, 1982). Pendekatan etnografi sangat berguna dalam memahami proses perubahan, pengembangan program aksi, serta implementasi, evaluasi, dan modifikasi program pendidikan (Wilcox, 1982).

Utomo & Mutmainnah (2024) menerapkan teknik etnografi dalam pembelajaran PPKn berbasis budaya lokal dan kebangsaan di

sekolah menengah Kota Makassar. Penelitian mereka menunjukkan bahwa mayoritas siswa memiliki pemahaman yang baik tentang konsep 3S (*Sipakainge*, *Sipakatau*, *Sipakalebbi*) dari suku Bugis setelah penerapan teknik etnografi. Namun, masih terdapat tantangan terkait keterbatasan waktu, sumber daya, dan integrasi nilai-nilai budaya lokal ke dalam kurikulum nasional (Utomo & Mutmainnah, 2024).

Penelitian etnografi di SDit Khaairul Ummah Rejang Lebong Bengkulu mengungkapkan bahwa penguatan nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan melalui budaya sekolah yang tercermin dalam aktivitas sehari-hari, seperti kegiatan doa bersama, saling menghormati di tengah perbedaan, piket kelas, diskusi kelas, dan sikap saling menghargai. Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan etnografi mampu mengungkap praktik-praktik kultural yang membentuk karakter peserta didik secara implisit (Utomo & Mutmainnah, 2024).

2. Pendekatan Cross-Cultural

Pendekatan lintas budaya (*cross-cultural*) dalam antropologi pendidikan membandingkan sistem pendidikan antar suku atau bangsa untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam praktik pendidikan. Demirdağ (2025) menekankan bahwa penelitian antropologis diperlukan untuk memahami masyarakat dan sistem pendidikannya, yang juga mengharuskan penanganan masalah pembelajaran dan didaktik. Pendekatan lintas budaya membantu para pendidik untuk menyadari bahwa praktik pendidikan yang efektif di satu konteks budaya belum tentu efektif di konteks lain, sehingga mendorong pengembangan pedagogi yang responsif budaya (Demirdağ, 2025).

D. Hakikat Manusia dalam Pendidikan

Antropologi memandang manusia sebagai makhluk yang memiliki dua dimensi fundamental: sebagai makhluk yang harus dididik (*Homo Educandum*) dan sebagai makhluk sosial (*Homo Socius*).

Kedua dimensi ini saling terkait dan menjadi dasar bagi pemahaman tentang hakikat pendidikan.

1. Homo Educandum (Makhluk yang Harus Dididik)

Konsep *Homo Educandum* menegaskan bahwa manusia adalah makhluk yang tidak sempurna secara instingtif dan memerlukan proses pendidikan untuk mengembangkan potensi kemanusiaannya. Berbeda dengan hewan yang dilengkapi dengan insting untuk bertahan hidup, manusia harus belajar melalui proses sosialisasi dan enkulturasi untuk menjadi anggota masyarakat yang berfungsi (Demirdağ, 2025).

Demirdağ (2025) mengutip pepatah bahwa "manusia membutuhkan pendidikan dan pelatihan setelah roti," yang menunjukkan bahwa pendidikan merupakan fenomena yang tak terpisahkan dari masyarakat dan budaya. Proses pendidikan memungkinkan manusia untuk mempelajari kebajikan, sikap, perilaku, dan nilai-nilai yang khas dari sistem sosial tempat ia dibesarkan (Demirdağ, 2025). Dalam konteks ini, sekolah berfungsi sebagai institusi yang secara sengaja merancang pengalaman belajar untuk mengembangkan seluruh aspek kepribadian manusia.

2. Homo Socius (Makhluk Sosial)

Homo Socius menekankan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup dan berkembang tanpa interaksi dengan orang lain. Demirdağ (2025) mendefinisikan sosialisasi sebagai proses di mana individu mempelajari kebajikan, sikap, perilaku, dan nilai-nilai yang khas dari sistem sosial tempat ia dibesarkan, dan menjalankan tindakannya sesuai dengan elemen-elemen tersebut. Pendidikan, dalam pengertian ini, adalah proses sosialisasi yang sistematis di mana individu belajar menjadi bagian dari masyarakat (Demirdağ, 2025).

Kedua dimensi ini *Homo Educandum* dan *Homo Socius* menunjukkan bahwa pendidikan bukanlah sekadar transfer pengetahuan, melainkan proses pembentukan manusia secara utuh

yang mampu hidup berdampingan dengan sesamanya dalam masyarakat yang beragam.

E. Nilai-nilai Budaya Lokal dalam Kurikulum

Integrasi nilai-nilai budaya lokal ke dalam kurikulum sekolah merupakan upaya untuk menjembatani pengetahuan formal dengan kearifan lokal yang hidup di masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya melestarikan warisan budaya, tetapi juga membuat pembelajaran lebih bermakna dan kontekstual bagi peserta didik.

1. Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal

Mulyangga dkk. (2025) meneliti efektivitas pembelajaran berbasis kearifan lokal dalam membangun kebhinekaan peserta didik. Penelitian mereka menunjukkan bahwa efektivitas pembelajaran berbasis kearifan lokal dinilai lebih tinggi daripada pembelajaran konvensional. Selain itu, terdapat perubahan sikap peserta didik, bermula dari rendahnya tingkat kepekaan terhadap pentingnya menghargai perbedaan, menjadi bersikap penuh toleransi, kerjasama, dan saling berempati antar individu dari berbagai latar belakang sosiokultural yang berbeda-beda (Mulyangga et al., 2025).

Rahmawati (2024) dalam penelitiannya tentang pemanfaatan media pembelajaran berbasis kearifan lokal di sekolah dasar daerah pedesaan menemukan bahwa cukup banyak sumber daya berbasis kearifan lokal yang bisa digunakan sebagai media pembelajaran. Guru di lokasi penelitian pun memiliki kompetensi dan pengalaman dalam menggunakan media tersebut. Respon siswa terhadap penggunaan media pembelajaran berbasis kearifan lokal juga sangat baik (Rahmawati, 2024).

2. Kearifan Lokal dalam Pembelajaran

Penelitian etnosains oleh Lestari (2023) mengeksplorasi konsep sains dalam proses pembuatan anyaman pandan dan budaya betangas di Muaro Jambi sebagai sumber belajar sains. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa dalam pembuatan anyaman pandan terdapat konsep sains tentang suhu dan kalor pada perpindahan kalor secara konduksi dan radiasi, serta materi gaya gesek pada proses menganyam. Sementara itu, proses betangas (mandi uap) mengandung konsep sains tentang perpindahan kalor secara konveksi (Lestari, 2023). Temuan ini menunjukkan bahwa kearifan lokal dapat dijadikan sumber belajar yang kaya akan konsep-konsep ilmiah.

Pengabdian masyarakat di SDN Gili Anyar oleh tim dari Universitas Negeri Malang mengoptimalkan kearifan lokal Madura sebagai media pembelajaran monopoli. Media ini mendapat respons sangat baik dari siswa dan mampu memfasilitasi peningkatan pemahaman dan partisipasi dalam pembelajaran IPAS, sekaligus mengenalkan siswa terhadap kebudayaan dan tradisi pulau Madura sebagai strategi pelestarian kearifan lokal (Mulyangga et al., 2025).

F. Konsep "Pendidikan Tanpa Sekolah" (Pendidikan Informal)

Pendidikan informal adalah proses pembelajaran yang berlangsung di luar institusi sekolah formal, melalui pengalaman sehari-hari, interaksi sosial, ritual, dan kehidupan bermasyarakat. Dalam masyarakat adat, pendidikan informal memainkan peran sentral dalam transmisi nilai dan keterampilan dari generasi ke generasi.

1. Pengertian Pendidikan Informal

Pendidikan informal didefinisikan sebagai proses sepanjang hayat di mana setiap individu memperoleh perilaku, nilai-nilai, kemahiran, dan pengetahuan dari pengalaman harian serta pengaruh dari lingkungan mereka melalui keluarga, jiran, pekerjaan, bermain, dan media massa (Coombs & Ahmed, 1974). Berbeda dengan pendidikan formal yang terstruktur dan berhierarki, pendidikan informal berlangsung dalam konteks kehidupan sehari-hari (*in context*)

dan tidak memerlukan kurikulum atau lembaga khusus (Coombs & Ahmed, 1974).

Coombs dan Ahmed (1974) membedakan ketiga spektrum pendidikan sebagai berikut: (1) Pendidikan Formal sistem pendidikan terstruktur mulai dari sekolah dasar hingga universitas; (2) Pendidikan Non-Formal aktivitas pendidikan terorganisasi di luar sistem formal; dan (3) Pendidikan Informal proses sepanjang hayat yang terjadi melalui pengalaman sehari-hari di lingkungan keluarga dan masyarakat (Coombs & Ahmed, 1974).

Pendidikan informal tidak hanya terjadi di luar sekolah, tetapi juga dapat berlangsung dalam konteks pendidikan formal melalui pengalaman-pengalaman siswa ketika mereka bekerja dalam latihan kelompok atau berinteraksi di luar kurikulum (Jarvis, 2006). Menurut Jarvis (2006, 2007), proses pembelajaran informal lebih menekankan bagaimana seseorang individu berusaha menjadi anggota dalam masyarakat tertentu dengan mempertimbangkan berbagai disiplin akademik di bawah kontinum sosiologi, psikologi, dan filsafat (Jarvis, 2006).

2. Pendidikan Informal dalam Ritual dan Kehidupan Sehari-hari

Nursanti, Wilodati, & Komariah (2023) meneliti pendidikan informal sebagai upaya pelestarian perkawinan endogami di Desa Adat Tenganan Pegringsingan, Bali. Penelitian mereka menunjukkan bahwa upaya pelestarian ini dilakukan melalui pendidikan informal yang tercermin dalam ritual *materuna nyoman* dan *madaha*. Melalui ritual ini, anak diberikan persiapan menjadi *krama desa* (warga asli desa adat) yang bertanggung jawab sejak dini untuk menjaga dan mengikuti segala aturan desa adat. Proses ini diharapkan dapat membentuk mentalitas yang tangguh sehingga generasi muda dapat melestarikan kearifan lokal mereka (Nursanti et al., 2023).

3. Sekolah Adat Pesinauan

Sekolah Adat Pesinauan di Banyuwangi merupakan contoh menarik tentang pendidikan informal yang berbasis pada pelestarian budaya lokal. Sekolah adat ini hadir sebagai sarana pendidikan informal untuk melestarikan budaya Osing yang kaya akan tradisi dan kearifan lokal. Dengan pendekatan yang fleksibel dan sederhana, sekolah adat ini mengajarkan adat istiadat, filosofi budaya, dan pengetahuan lokal yang diwariskan turun-temurun (Hamid et al., 2025).

Kurikulum Sekolah Adat Pesinauan mencakup berbagai aspek: (1) budaya (bahasa Osing, kesenian, adat istiadat, dan makanan tradisional); (2) ekologi (pengetahuan lingkungan, pemanfaatan tumbuhan, dan pengelolaan sumber daya alam); (3) kesehatan (penggunaan tanaman obat tradisional dan gaya hidup sehat); (4) ekonomi kreatif (kewirausahaan berbasis budaya lokal); dan (5) hukum dan advokasi (nilai-nilai toleransi, hukum adat, dan advokasi masyarakat adat). Program-program yang dilaksanakan meliputi kelas tentang rumah tradisional Osing, kelas mengenakan ikat kepala (*udeng*) dan sarung kain khas Banyuwangi, kelas mengenal ragam motif batik Banyuwangi, serta kelas alat musik tradisional (Hamid et al., 2025).

Hamid dkk. (2025) menegaskan bahwa keberhasilan pelestarian budaya bergantung pada transformasi pendidikan luar sekolah menjadi sistem yang lebih inklusif dan dialogis bagi semua pihak. Penelitian mereka juga mengungkap bahwa enkulturasi dalam pendidikan nonformal merupakan proses yang dinegosiasikan dan selektif, yang didorong oleh peran generasi muda (Hamid et al., 2025).

G. Relevansi Teori Antropologi Clifford Geertz ("Thick Description") untuk Menganalisis Perilaku di Sekolah

Clifford Geertz, seorang antropolog Amerika terkemuka, mengembangkan metode "Thick Description" (deskripsi tebal) sebagai pendekatan untuk memahami makna di balik tindakan dan praktik budaya. Metode ini tidak hanya mengamati dan mencatat

perilaku yang tampak, tetapi juga menginterpretasikan apa makna perilaku tersebut dalam konteks budayanya.

1. Pengertian Thick Description

Istilah *thick description* diperkenalkan dalam tulisan filosofis Gilbert Ryle dan kemudian dikembangkan oleh Clifford Geertz dalam antropologi, terutama dalam studi terkenalnya tentang sabung ayam di Bali (Geertz, 1973). Thick description adalah deskripsi intensif dan berskala kecil tentang kehidupan sosial dari hasil observasi, yang melalui interpretasi budaya yang lebih luas dapat dibuat generalisasi (Geertz, 1973).

Secara lebih rinci, thick description merujuk pada deskripsi rinci tentang perilaku aktual, yang biasanya dihasilkan dari etnografi, yang cukup untuk memungkinkan pembaca melihat di bawah penampilan permukaan dengan menawarkan pemahaman tentang pola dan konteks yang mendasari yang memberikan makna pada informasi tersebut (Geertz, 1973). Kebalikannya adalah *thin description* (deskripsi tipis), yang hanya berupa pernyataan singkat dan dangkal tentang apa yang terjadi tanpa informasi kontekstual yang memadai untuk memahami makna perilaku tersebut (Geertz, 1973).

Geertz (1973) mengilustrasikan perbedaan antara deskripsi tipis dan tebal melalui contoh dua anak laki-laki yang mengerjapkan kelopak mata mereka. Salah satu anak memiliki kedutan yang tidak disengaja (*twitch*), sementara anak lainnya dengan sengaja mengirimkan sinyal kepada temannya (*wink*). Meskipun kedua gerakan itu identik secara fisik, gerakan pertama kedutan secara kualitatif berbeda dari gerakan kedua, yang merupakan kedipan. Membedakan perbedaan dan mengenali kedipan sebagai pertunjukan budaya adalah inti dari thick description (Geertz, 1973).

Dengan kata lain, thick description bukanlah deskripsi yang "dipenuhi" atau "sembarangan", juga bukan penyajian data yang berlebihan. Thick description adalah interpretasi, bukan sekadar penyajian fakta yang tidak diinterpretasikan (Geertz, 1973). Thick

description merupakan hasil temuan penelitian, atau interpretasi etnografer terhadap data yang dihasilkan dalam studi etnografi (Geertz, 1973). Etnografi, menurut Geertz, tersusun dari thick description, yang "menuliskan" atau menginskripsikan budaya (Geertz, 1973).

2. Aplikasi dalam Analisis Perilaku Sekolah

Geertz menekankan pentingnya memahami konteks budaya di mana perilaku terjadi. Dalam pendidikan, ini berarti memperhitungkan latar belakang budaya siswa, guru, dan komunitas yang lebih luas. Mengenali nuansa budaya dapat membantu pendidik merancang pengalaman belajar yang lebih relevan dan efektif (Geertz, 1973). Pendekatan ini sejalan dengan tujuan pendidikan multikultural, di mana pendidik dapat menggunakan thick description untuk menjembatani kesenjangan budaya dan mempromosikan inklusivitas di dalam kelas. Dengan memahami latar belakang budaya siswa yang beragam, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih mendukung dan peka budaya (Geertz, 1973).

Dalam konteks pendidikan di Indonesia, pendekatan thick description sangat relevan untuk menganalisis perilaku di sekolah yang beragam secara budaya. Misalnya, etnografi pendidikan dapat menggunakan thick description untuk memahami makna di balik perilaku santri di pesantren, yang mungkin berbeda secara signifikan dari makna perilaku yang sama di sekolah umum. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali lapisan-lapisan makna yang lebih dalam dari praktik pendidikan, seperti kepatuhan kepada kyai, ritual keagamaan, dan sistem nilai yang dianut di pesantren (Geertz, 1973).

Para peneliti kualitatif sering menggunakan istilah thick description sebagai daya tarik retoris untuk meyakinkan pembaca tentang kompetensi mereka dalam penelitian kualitatif dan kredibilitas temuan mereka (Geertz, 1973). Namun, yang lebih penting dari sekadar menyebut istilah tersebut adalah kemampuan untuk

menunjukkan thick description melalui interpretasi budaya yang disajikan sebagai temuan. Validitas sebuah etnografi terletak bukan pada klaim tentang thick description, melainkan pada apakah dan seberapa baik etnografi tersebut membedakan "kedipan" dari "kedutan" (Geertz, 1973).

H. Studi Kasus: Etnografi Pola Belajar Santri di Pondok Pesantren Salafiyah dan Sekolah Umum Modern

Studi kasus ini membandingkan pola belajar santri di Pondok Pesantren Salafiyah dengan siswa di sekolah umum modern menggunakan pendekatan etnografi. Perbandingan ini mengungkap perbedaan mendasar dalam pendekatan, nilai, dan praktik pendidikan antara kedua institusi.

1. Pondok Pesantren Salafiyah

Pondok Pesantren Salafiyah merupakan lembaga pendidikan tradisional Islam yang mempertahankan metode pembelajaran klasik, terutama pengkajian kitab kuning (kitab klasik berbahasa Arab). Pola belajar di pesantren salafiyah ditandai oleh beberapa ciri khas: pertama, hubungan guru-murid yang bersifat personal dan berlangsung dalam jangka waktu panjang; kedua, sistem pembelajaran yang berpusat pada kyai sebagai otoritas keilmuan dan moral; ketiga, penekanan pada hafalan dan pemahaman teks keagamaan; keempat, kehidupan yang terintegrasi antara belajar, beribadah, dan berinteraksi sosial dalam satu kompleks pesantren.

Penelitian etnografi tentang kepemimpinan perempuan ulama (nyai) di Pondok Pesantren Salafiyah Kabupaten Cirebon mengungkapkan bahwa kepemimpinan nyai memberikan dampak positif terhadap kemajuan pesantren. Nyai lebih peka terhadap perubahan yang ada di masyarakat dan menggunakan ekosistem yang bernuansa modern, terutama ekosistem digitalisasi sebagai penunjang kemajuan pesantren. Strategi yang digunakan dalam memajukan pesantren adalah nilai-nilai maskulinitas (berani, aktif, kuat, dan

popularitas), sementara resistensi yang dilakukan adalah terhadap unsur-unsur yang selama ini dilarang oleh orang-orang normatif patriarkal (Hamid et al., 2025). Temuan ini menunjukkan bahwa pesantren salafiyah pun mengalami dinamika dan adaptasi terhadap perubahan zaman.

2. Sekolah Umum Modern

Sekolah umum modern beroperasi berdasarkan kurikulum nasional dengan pendekatan yang lebih terstruktur dan terstandarisasi. Pola belajar di sekolah umum modern ditandai oleh: pertama, pembelajaran yang berorientasi pada pencapaian kompetensi akademik yang terukur; kedua, hubungan guru-murid yang lebih formal dan terbatas pada jam pelajaran; ketiga, penggunaan teknologi dan media pembelajaran yang beragam; keempat, penekanan pada pengembangan keterampilan abad 21 seperti berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi.

3. Analisis Perbandingan

Perbandingan antara kedua sistem pendidikan ini menunjukkan perbedaan mendasar dalam beberapa aspek:

Pertama, orientasi pendidikan. Pesantren salafiyah berorientasi pada pembentukan manusia yang beriman dan bertakwa, dengan penekanan pada penguasaan ilmu keagamaan dan pembentukan akhlak. Sekolah umum modern berorientasi pada pengembangan kompetensi akademik dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan kehidupan bermasyarakat.

Kedua, metode pembelajaran. Pesantren salafiyah menggunakan metode *bandongan* (kyai membacakan dan menjelaskan kitab) dan *sorogan* (santri membacakan kitab di hadapan kyai) yang menekankan pada hafalan dan pemahaman mendalam terhadap teks. Sekolah umum modern menggunakan berbagai metode pembelajaran yang bervariasi, termasuk diskusi, proyek, dan pembelajaran berbasis teknologi.

Ketiga, hubungan pendidik-peserta didik. Di pesantren, hubungan kyai-santri bersifat personal dan berlangsung lama, dengan kyai berperan sebagai guru sekaligus pembimbing spiritual. Di sekolah umum, hubungan guru-siswa lebih bersifat profesional dan terbatas pada konteks pembelajaran di kelas.

Keempat, nilai-nilai yang ditanamkan. Pesantren menanamkan nilai-nilai keagamaan, kepatuhan, kesederhanaan, dan kemandirian. Sekolah umum menanamkan nilai-nilai kebangsaan, demokrasi, hak asasi manusia, dan keterampilan sosial yang lebih luas.

Implikasi bagi Pendidikan Indonesia. Perbandingan ini menunjukkan bahwa kedua sistem pendidikan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pesantren salafiyah unggul dalam pembentukan karakter dan kedalaman pemahaman keagamaan, tetapi mungkin kurang dalam pengembangan keterampilan abad 21 dan literasi digital. Sekolah umum modern unggul dalam pengembangan kompetensi akademik dan keterampilan yang relevan dengan tuntutan zaman, tetapi mungkin kurang dalam pembentukan karakter dan kedalaman spiritual.

Pendekatan etnografi dengan metode thick description memungkinkan kita untuk memahami makna di balik praktik pendidikan di kedua institusi, bukan sekadar mendeskripsikan perilaku permukaan. Melalui pendekatan ini, kita dapat menggali nilai-nilai, asumsi, dan keyakinan yang mendasari pola belajar di pesantren dan sekolah umum, serta bagaimana kedua sistem ini beradaptasi dengan perubahan sosial dan tuntutan zaman. Integrasi antara nilai-nilai pesantren dan kompetensi sekolah modern menjadi tantangan bagi pengembangan pendidikan di Indonesia ke depan.

Rangkuman

Bab ini telah menguraikan perspektif antropologi dalam memahami pendidikan sebagai proses pewarisan budaya dan pembentukan manusia seutuhnya. Beberapa poin penting yang dapat dirangkum adalah:

1. Antropologi merupakan ilmu yang mempelajari budaya masyarakat secara holistik (Ritzer, 2011), sementara antropologi pendidikan adalah penelaahan akademis tentang sistem pendidikan dari sudut pandang budaya, dengan fokus pada transmisi budaya dalam konteks pendidikan formal maupun informal (Wilcox, 1982).
2. Enkulturasi adalah proses pewarisan nilai budaya dari generasi ke generasi, sedangkan akulturasi adalah penerimaan dan adaptasi unsur budaya luar. Kedua proses ini bersifat negosiatif dan selektif, dipengaruhi oleh relasi kuasa yang asimetris (Demirdağ, 2025; Hamid et al., 2025).
3. Etnografi adalah metode penelitian yang menggambarkan dan menganalisis kebudayaan suatu masyarakat melalui pengamatan terlibat dalam periode panjang (Ritzer, 2011). Etnografi pendidikan menerapkan metode ini untuk memahami proses pendidikan dalam setting budaya tertentu, dengan perhatian pada hal-hal sehari-hari dan implisit dalam praktik pendidikan (Wilcox, 1982).
4. Hakikat manusia dalam pendidikan mencakup konsep *Homo Educandum* (makhluk yang harus dididik) dan *Homo Socius* (makhluk sosial). Kedua dimensi ini menunjukkan bahwa pendidikan adalah proses sosialisasi yang sistematis untuk membentuk manusia yang mampu hidup dalam masyarakat (Demirdağ, 2025).
5. Nilai-nilai budaya lokal dalam kurikulum terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman, partisipasi, dan sikap toleransi peserta didik. Pembelajaran berbasis kearifan lokal dinilai lebih tinggi efektivitasnya daripada pembelajaran konvensional (Mulyangga et al., 2025; Rahmawati, 2024).
6. Pendidikan informal adalah proses sepanjang hayat yang terjadi melalui pengalaman sehari-hari di lingkungan keluarga dan masyarakat (Coombs & Ahmed, 1974). Pendidikan informal berperan sentral dalam pelestarian budaya dan pembentukan identitas (Nursanti et al., 2023). Sekolah Adat Pesinauan

merupakan contoh pendidikan informal yang mengajarkan adat istiadat, filosofi budaya, dan pengetahuan lokal secara fleksibel (Hamid et al., 2025).

7. Teori Thick Description Clifford Geertz menawarkan pendekatan interpretatif untuk memahami makna di balik perilaku di sekolah, membedakan antara deskripsi permukaan (*thin description*) dan interpretasi mendalam tentang makna budaya (*thick description*) (Geertz, 1973).
8. Perbandingan pola belajar di pesantren salafiyah dan sekolah umum modern menunjukkan perbedaan mendasar dalam orientasi, metode, hubungan pendidik-peserta didik, dan nilai-nilai yang ditanamkan. Kedua sistem memiliki kelebihan dan kekurangan yang saling melengkapi.

Pertanyaan Reflektif

1. Dalam pengalaman Anda sebagai mahasiswa atau calon pendidik, bagaimana Anda melihat proses enkulturasi terjadi di lingkungan sekolah yang pernah Anda masuki? Nilai-nilai budaya apa yang secara sengaja maupun tidak sengaja ditransmisikan melalui pendidikan formal?
2. Menurut Anda, sejauh mana kurikulum di Indonesia saat ini telah mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal? Berikan contoh konkret dari pengalaman Anda atau dari pengamatan di lingkungan sekitar.
3. Bagaimana pendekatan etnografi dan *thick description* dapat membantu Anda sebagai calon guru untuk lebih memahami latar belakang budaya siswa yang beragam di kelas? Berikan contoh situasi di mana pendekatan ini dapat diterapkan.
4. Bandingkan pengalaman belajar Anda di sekolah formal dengan konsep pendidikan informal yang ditemukan di masyarakat adat. Apa yang dapat dipelajari dari pendidikan informal untuk memperbaiki praktik pendidikan formal?

5. Refleksikan perbedaan antara pendidikan di pesantren salafiyah dan sekolah umum modern. Menurut Anda, nilai-nilai apa dari kedua sistem tersebut yang dapat diintegrasikan untuk menciptakan pendidikan yang lebih holistik?
6. Bagaimana Anda melihat tantangan pelestarian kearifan lokal di tengah arus globalisasi dan digitalisasi? Apa peran guru dalam menjembatani pengetahuan lokal dan global?



BAB 3
SOSIALISASI DAN KEPRIBADIAN

Pendahuluan

Sosialisasi merupakan proses fundamental dalam kehidupan manusia yang memungkinkan individu menjadi anggota masyarakat yang berfungsi secara efektif. Proses ini tidak hanya mentransmisikan nilai dan norma budaya, tetapi juga membentuk kepribadian dan identitas diri individu. Dalam konteks pendidikan, pemahaman tentang mekanisme sosialisasi menjadi krusial karena institusi pendidikan berperan sebagai jembatan antara keluarga dan masyarakat luas. Bab ini bertujuan untuk menjelaskan secara komprehensif proses pembentukan diri (*self*) melalui interaksi di lingkungan pendidikan serta pengaruhnya terhadap perkembangan kepribadian peserta didik.

1. Definisi Sosialisasi: Tahapan Sosialisasi Primer dan Sekunder

Sosialisasi didefinisikan sebagai proses internalisasi kebiasaan bersama komunitas ke dalam diri aktor, di mana individu belajar dan menyesuaikan diri dengan nilai, norma, dan pola perilaku yang berlaku dalam masyarakat. Proses ini berlangsung melalui dua tahapan utama yang saling melengkapi.

Sosialisasi primer terjadi dalam lingkungan keluarga pada masa awal kehidupan anak. Keluarga merupakan agen sosialisasi

pertama yang mengenalkan nilai-nilai dasar, norma, dan pola interaksi yang menjadi fondasi kepribadian anak. Pada tahap ini, anak belajar tentang kasih sayang, kepercayaan, disiplin awal, serta perbedaan antara benar dan salah, yang seluruhnya menjadi landasan bagi perkembangan kepribadian di masa mendatang (Tamsir:2022). Pengaruh sosialisasi primer sangat mendalam karena terjadi pada masa pembentukan struktur kognitif dan emosional dasar anak.

Sosialisasi sekunder adalah proses sosialisasi lanjutan yang memperkenalkan individu ke dalam kelompok tertentu dalam masyarakat (Tamsir:2022). Bentuk-bentuknya adalah resosialisasi dan desosialisasi. Dalam proses resosialisasi, seseorang diberi identitas diri yang baru, sedangkan dalam proses desosialisasi, seseorang mengalami pencabutan identitas diri yang lama. Sekolah memiliki peran strategis sebagai agen sosialisasi sekunder yang menjembatani lingkungan keluarga dengan masyarakat yang lebih luas. Di sekolah, anak mempelajari hal-hal baru yang belum diperoleh dalam keluarga, seperti aturan mengenai kemandirian (*independence*), prestasi (*achievement*), universalisme, dan spesifitas (*specificity*) (Tamsir:2022).

2. Teori Pembentukan Diri (The Looking Glass Self - C.H. Cooley)

Teori *Looking Glass Self* yang dikemukakan oleh Charles Horton Cooley (1902) memberikan kerangka pemahaman tentang bagaimana konsep diri individu terbentuk melalui interaksi sosial. Cooley berpendapat bahwa individu membentuk konsep dirinya berdasarkan keyakinan tentang bagaimana orang lain melihat dirinya (Aprillia & Rizqiani:2023). Terdapat tiga proses dalam pembentukan diri menurut Cooley: pertama, individu membayangkan bagaimana orang lain melihat dirinya; kedua, individu melakukan reaksi terhadap penilaian orang lain yang dibayangkan tersebut; dan ketiga, individu membentuk konsep dirinya dari penilaian orang lain yang dibayangkan tersebut (Aprillia & Rizqiani:2023).

Dalam konteks pendidikan, guru dan teman sebaya berperan sebagai "cermin sosial" bagi pembentukan konsep diri siswa. Guru, sebagai figur otoritas di sekolah, memiliki pengaruh signifikan terhadap pembentukan konsep diri siswa melalui interaksi sehari-hari. Penilaian, umpan balik, dan sikap guru terhadap siswa membentuk cara siswa memandang dirinya sendiri. Penelitian menunjukkan bahwa kualitas "cermin sosial" yang diterima siswa—baik dari guru, orang tua, maupun teman sebaya—memainkan peran penting dalam pembentukan harga diri dan konsep diri mereka (Vouteau:2018).

3. Teori Mead (I and Me)

George Herbert Mead mengembangkan teori interaksionisme simbolik yang menekankan pentingnya bahasa dan simbol dalam pembentukan diri. Mead mengidentifikasi dua aspek atau fase diri, yaitu "I" dan "Me". "Me" merupakan diri sebagai objek sosok diri sebagaimana dilihat, dinilai, dan diharapkan oleh orang lain. "Me" adalah hasil internalisasi sikap orang lain yang digeneralisir (*generalized other*), yang mencerminkan harapan dan norma sosial yang terinternalisasi (Quinlan & Curtin:2017). "I" adalah diri sebagai subjek yang bertindak bagian yang memperhatikan diri sendiri, sumber orisinalitas, kreativitas, dan spontanitas. "I" bereaksi terhadap "Me" dan merupakan sumber utama sesuatu yang baru dalam proses sosial (Bullough:2021).

Dalam konteks pendidikan, sekolah memiliki peran sentral dalam membentuk "Me" siswa melalui berbagai aturan, harapan, dan norma yang harus dipatuhi. Sekolah mengenalkan disiplin, tanggung jawab, dan standar perilaku yang menjadi bagian dari "Me" siswa. Penelitian tentang interaksi guru dan siswa menunjukkan bahwa dalam proses pembelajaran, baik guru maupun siswa memiliki konsep "I" dan "Me" yang membuat mereka terkadang menjadi subjek dan dalam kondisi tertentu juga menjadi objek (Peneliti:2020). Simbol-simbol yang digunakan guru dalam pembelajaran baik verbal maupun nonverbal memainkan peran penting dalam membentuk konsep diri

siswa. Siswa tidak serta merta memberikan pemaknaan terhadap simbol, tetapi melalui proses mental yang melibatkan impuls, persepsi, manipulasi, dan konsumsi informasi (Peneliti:2020).

4. Kepribadian dalam Konteks Pendidikan: Pengaruh Pola Asuh

Pola asuh orang tua merupakan faktor determinan yang signifikan terhadap kepribadian, prestasi akademik, dan perilaku sosial anak. Terdapat beberapa tipe pola asuh utama yang mempengaruhi perkembangan kepribadian anak:

a. Pola Asuh Otoriter

Pola asuh ini ditandai dengan kontrol yang ketat, aturan yang kaku, dan tuntutan kepatuhan tanpa kompromi. Penelitian menunjukkan bahwa pola asuh otoriter tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap motivasi berprestasi siswa (Vardia & Nurdibyanandaru:2018).

b. Pola Asuh Demokratis (*Authoritative*)

Pola asuh demokratis menunjukkan pengaruh paling positif terhadap perkembangan kepribadian anak. Pola asuh ini dicirikan oleh komunikasi dua arah yang terbuka, pemberian kebebasan yang bertanggung jawab, dan dukungan terhadap pengembangan potensi anak. Penelitian menunjukkan bahwa pola asuh demokratis memiliki pengaruh signifikan terhadap motivasi berprestasi siswa (Vardia & Nurdibyanandaru:2018).

c. Pola Asuh Permisif

Pola asuh permisif ditandai dengan sedikitnya aturan dan kontrol, serta kebebasan yang berlebihan bagi anak. Pola asuh ini juga memiliki pengaruh signifikan terhadap motivasi berprestasi siswa, meskipun dengan arah yang berbeda dari pola asuh demokratis (Vardia & Nurdibyanandaru:2018).

Penelitian pada remaja dari kalangan kelas menengah atas menunjukkan bahwa persepsi terhadap penekanan orang tua pada prestasi akademik (dibandingkan dengan nilai-nilai prososial) memiliki implikasi signifikan terhadap penyesuaian diri anak (Ciciolla, Curlee, & Karageorge:2017). Pola fungsi anak yang lebih sehat termasuk prestasi sekolah yang lebih tinggi, harga diri yang lebih tinggi, dan gejala psikologis yang lebih rendah berkaitan dengan penekanan prestasi orang tua yang rendah hingga netral. Sebaliknya, fungsi anak yang lebih buruk berkaitan dengan penekanan prestasi orang tua yang tinggi, terutama ketika disertai dengan kritik orang tua yang tinggi (Ciciolla, Curlee, & Karageorge:2017).

5. Sosialisasi Gender di Sekolah: Kurikulum Tersembunyi (Hidden Curriculum)

Sekolah tidak hanya mentransmisikan pengetahuan akademik, tetapi juga berperan dalam membentuk pemahaman tentang peran gender melalui kurikulum tersembunyi (*hidden curriculum*). Kurikulum tersembunyi merujuk pada nilai-nilai, sikap, dan norma yang tidak secara eksplisit diajarkan tetapi diinternalisasi siswa melalui berbagai aspek kehidupan sekolah.

Penelitian tentang kurikulum tersembunyi dan bias gender di sekolah dasar mengungkapkan bahwa sebagian guru berupaya menciptakan kesetaraan dengan pembagian tugas secara heterogen, namun sebagian guru lain secara tidak sadar mereproduksi bias gender. Contohnya, beberapa guru menghubungkan kerja fisik dengan siswa laki-laki dan menganggap perbedaan gender sebagai hal yang wajar, bukan sebagai konstruksi sosial (Wijayanto, Purwandari, & Widanarti:2025). Penelitian ini menggarisbawahi betapa kesadaran kritis guru sangat penting untuk mengidentifikasi dan mengatasi praktik pedagogis yang bias gender, serta perlunya sarana belajar reflektif untuk membongkar hierarki gender tersembunyi di pendidikan dasar (Wijayanto, Purwandari, & Widanarti:2025).

Penelitian lain dalam konteks pengajaran bahasa Inggris di Vietnam juga menunjukkan bahwa konten gender dalam buku teks dapat dianggap sebagai kurikulum tersembunyi yang dapat menghambat atau memajukan kesetaraan (Anonim:2025). Guru sering memprioritaskan transfer pengetahuan linguistik dan kurang memberi ruang bagi pengembangan pemikiran kritis dan refleksi diri siswa mengenai isu-isu gender. Terkadang desain pengajaran dan interaksi guru juga dipengaruhi oleh bias mereka sendiri—baik secara sadar maupun tidak sadar (Anonim:2025).

6. Peran Agen Sosialisasi: Keluarga, Sekolah, Teman Sebaya, dan Media Massa

Proses sosialisasi berlangsung melalui berbagai agen yang masing-masing memiliki peran spesifik dan saling mempengaruhi. Terdapat empat agen sosialisasi utama: keluarga, kelompok bermain/teman sebaya, lembaga pendidikan/sekolah, dan media massa (Tamsir:2022; Peneliti:2020). Keempat agen ini beroperasi dalam konteks yang berbeda dan terkadang menghadirkan nilai-nilai yang saling bertentangan.

a. Keluarga

Keluarga merupakan agen sosialisasi primer yang paling penting. Di sinilah fondasi kepribadian, pola perilaku, dan orientasi nilai pertama kali dibentuk. Keluarga merupakan kelompok primer yang selalu tatap muka di antara anggotanya, sehingga pengaruhnya sangat besar (Tamsir:2022).

b. Sekolah

Sekolah merupakan media sosialisasi yang lebih luas dari keluarga dan memiliki potensi pengaruh yang cukup besar dalam pembentukan sikap dan perilaku seorang anak. Di sekolah, anak dituntut untuk bisa bersikap mandiri dan senantiasa memperoleh perlakuan yang tidak berbeda dari teman-temannya. Sekolah juga

membentuk kepribadian siswa dengan membiasakan mereka untuk tertib, berpikir logis dan maju, hidup berencana, bekerja sama, berpacu dalam prestasi, serta saling menghargai dan tenggang rasa (Tamsir:2022; Peneliti:2020).

c. Teman Sebaya (Kelompok Bermain)

Kelompok bermain, baik yang berasal dari kerabat, tetangga, maupun teman sekolah, merupakan agen sosialisasi yang memiliki pengaruh besar dalam membentuk pola perilaku seseorang. Di dalam kelompok bermain, anak mempelajari berbagai kemampuan baru yang sering kali berbeda dengan apa yang mereka pelajari dari keluarga. Berbeda dengan pola sosialisasi dalam keluarga yang bersifat otoriter, di dalam kelompok bermain pola sosialisasinya bersifat egaliter karena kedudukan para pelakunya sederajat (Tamsir:2022).

d. Media Massa

Media massa merupakan agen sosialisasi yang kuat dalam membentuk keyakinan-keyakinan baru atau mempertahankan keyakinan yang ada. Ruang lingkup sosialisasi melalui media massa lebih luas dibandingkan media sosialisasi lainnya. Namun, media massa juga dapat membawa dampak negatif, seperti penayangan kekerasan di televisi yang diyakini telah menyebabkan penyimpangan perilaku anak-anak dalam beberapa kasus (Tamsir:2022).

Konflik nilai di antara agen sosialisasi sering terjadi, terutama ketika nilai yang diajarkan di keluarga berbeda dengan nilai yang diperkenalkan di sekolah atau media. Menurut sosiolog Jaeger, proses sosialisasi akan berjalan lancar apabila pesan-pesan yang disampaikan oleh agen-agen sosialisasi tidak bertentangan atau saling mendukung satu sama lain (Peneliti:2020).

Studi Kasus: Fenomena "Anak Mami" dan Kurangnya Kemandirian Siswa

Fenomena "anak mami" atau kurangnya kemandirian siswa merupakan manifestasi dari ketidakseimbangan dalam proses sosialisasi, terutama yang disebabkan oleh pola asuh yang terlalu protektif di keluarga dan sekolah. Individu yang mengalami fenomena ini menunjukkan ketergantungan yang berlebihan pada orang tua atau figur otoritas, kesulitan dalam mengambil keputusan, dan rendahnya inisiatif dalam menghadapi tantangan.

Dari perspektif teori Mead, fenomena ini dapat dipahami sebagai dominasi "Me" yang berlebihan atas "I". Ketika institusi sosial—baik keluarga maupun sekolah terlalu kaku dan menekan, individu kehilangan ruang untuk mengembangkan spontanitas dan kreativitas ("I"). Sekolah dan keluarga yang terlalu protektif cenderung membentuk "Me" yang sangat kuat, di mana individu terlalu patuh pada ekspektasi sosial dan kehilangan kemampuan untuk bertindak secara otonom.

Pola asuh yang terlalu protektif juga mempengaruhi konsep diri siswa sebagaimana dijelaskan dalam teori Cooley. Jika siswa terus-menerus menerima pesan bahwa mereka tidak mampu menghadapi tantangan sendiri, mereka akan menginternalisasi penilaian negatif tersebut dan mengembangkan konsep diri sebagai individu yang tidak kompeten. Penelitian tentang persepsi remaja terhadap penekanan prestasi orang tua menunjukkan bahwa tekanan dan kritik yang tinggi dari orang tua berkaitan dengan fungsi anak yang lebih buruk, termasuk harga diri yang lebih rendah (Ciciolla, Curlee, & Karageorge:2017).

Penelitian juga menunjukkan bahwa pola asuh demokratis yang memberikan ruang bagi otonomi dalam batasan yang wajar lebih efektif dalam mengembangkan kemandirian dan kepercayaan diri anak (Vardia & Nurdibyanandaru:2018). Sekolah juga

memiliki peran penting dalam mengembangkan kemandirian dengan memberikan tugas yang menuntut tanggung jawab pribadi dan mendorong partisipasi aktif siswa dalam kegiatan pembelajaran.



BAB 4

PERUBAHAN SOSIAL DAN PENDIDIKAN

Pendahuluan

Hubungan antara pendidikan dan perubahan sosial bersifat dialektis dan resiprokal, di mana keduanya saling mempengaruhi dalam suatu siklus yang dinamis. Di satu sisi, perubahan dalam struktur sosial, ekonomi, dan teknologi mendorong transformasi sistem pendidikan; di sisi lain, pendidikan berperan sebagai katalisator yang melahirkan inovasi dan menggerakkan perubahan masyarakat. Bab ini bertujuan untuk menganalisis hubungan timbal balik antara perubahan dalam masyarakat dan sistem pendidikan, dengan menelaah berbagai teori perubahan sosial, peran pendidikan sebagai respons sekaligus penyebab perubahan, serta tantangan kontemporer yang dihadapi dunia pendidikan di tengah gelombang transformasi digital dan pasca-pandemi.

1. Teori Perubahan Sosial: Evolusionisme, Siklus, dan Konflik serta Implikasinya pada Kurikulum

Pemahaman tentang teori perubahan sosial memberikan kerangka analitik untuk memahami bagaimana kurikulum pendidikan dibentuk dan terus bertransformasi. Terdapat tiga perspektif utama

dalam memahami perubahan sosial yang memiliki implikasi signifikan terhadap kebijakan dan praktik kurikulum.

a. Teori Evolusionisme

Teori evolusionisme memandang perubahan sosial sebagai proses perkembangan linear dari bentuk sederhana menuju bentuk yang lebih kompleks dan maju. Dalam konteks pendidikan, pandangan ini mendorong pengembangan kurikulum yang bersifat progresif dan adaptif terhadap tuntutan zaman. Kurikulum dipandang sebagai instrumen untuk mempersiapkan generasi mendatang menghadapi tahap perkembangan masyarakat yang lebih maju. Namun, pendekatan ini sering dikritik karena mengabaikan keragaman nilai dan asumsi normatif yang mendasari kurikulum, terutama ketika kurikulum tersebut dijustifikasi dengan alasan yang kontroversial (Easton:2026). Perdebatan tentang muatan kurikulum, seperti pengajaran teori evolusi di sekolah, mencerminkan ketegangan antara tanggung jawab epistemik sekolah dan penghormatan terhadap keragaman keyakinan warganegara (Easton:2026).

b. Teori Siklus

Teori siklus memandang perubahan sosial sebagai pola yang berulang, di mana masyarakat mengalami fase kelahiran, pertumbuhan, kemunduran, dan kelahiran kembali. Implikasi teori ini terhadap kurikulum adalah pentingnya menjaga keseimbangan antara inovasi dan pelestarian nilai-nilai fundamental. Kurikulum tidak boleh sepenuhnya meninggalkan warisan budaya, namun juga harus tanggap terhadap dinamika zaman.

c. Teori Konflik

Teori konflik, yang banyak dipengaruhi oleh perspektif neo-Marxis, feminis, dan kajian ras/etnis, melihat perubahan sosial sebagai hasil dari ketegangan dan perebutan kekuasaan antara kelompok-kelompok dalam masyarakat (Beyer & Liston:1996). Dalam perspektif

ini, kurikulum bukanlah entitas netral, melainkan arena pertarungan ideologis yang merefleksikan kepentingan kelompok dominan. Analisis radikal tentang kurikulum berfokus pada struktur dominasi di sekolah dan masyarakat luas, serta bagaimana kurikulum dapat memperkuat atau menantang ketidakadilan sosial (Beyer & Liston:1996). Implikasinya, kurikulum harus dikaji secara kritis untuk mengidentifikasi dan mengatasi bias yang mungkin memperkuat ketimpangan struktural.

2. Pendidikan sebagai Respons terhadap Perubahan

a. Perubahan dari Masyarakat Agraris ke Industri (Revolusi Industri 4.0)

Revolusi Industri 4.0, yang ditandai dengan pesatnya penggunaan kecerdasan buatan (AI) dan otomatisasi, telah memicu transformasi fundamental dalam cara kerja dilakukan dan siapa yang melakukannya (Ashizawa & Neubauer:2023). Perubahan ini memaksa institusi pendidikan untuk beradaptasi secara radikal karena pola pekerjaan masa depan mengalami pergeseran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sistem pendidikan tinggi, khususnya, memasuki periode perubahan mendalam akibat transformasi sosial dan ekonomi yang dipicu oleh penggunaan AI yang semakin meluas (Ashizawa & Neubauer:2023).

Pergeseran dari masyarakat agraris ke industri digital menuntut kurikulum yang tidak hanya mengajarkan pengetahuan teoritis, tetapi juga membekali peserta didik dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi dan literasi digital yang relevan dengan kebutuhan industri mutakhir. Muhammad Thamrin Hidayat, Dosen Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP UNUSA, mengkritisi relevansi beberapa materi pembelajaran yang masih diajarkan di Sekolah Dasar saat ini, dengan menyatakan bahwa sejumlah materi sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, terutama di era digital yang memungkinkan akses informasi begitu mudah (Hidayat:2024). Ia

menyoroti pentingnya reformasi kurikulum agar lebih relevan dengan kebutuhan nyata, mengusulkan agar materi pembelajaran lebih diarahkan pada keterampilan hidup yang mendukung perkembangan kognitif, psikomotorik, dan kreativitas siswa (Hidayat:2024).

b. Dampak Urbanisasi dan Migrasi terhadap Ketersediaan Sekolah

Urbanisasi dan migrasi penduduk membawa implikasi signifikan terhadap ketersediaan dan distribusi layanan pendidikan. Konsentrasi penduduk di perkotaan menciptakan tekanan pada kapasitas sekolah di kota, sementara daerah perdesaan menghadapi tantangan penutupan sekolah akibat berkurangnya jumlah siswa. Fenomena ini menuntut perencanaan pendidikan yang responsif terhadap dinamika kependudukan, termasuk pembangunan sekolah baru di wilayah urban yang berkembang pesat serta kebijakan afirmatif untuk memastikan akses pendidikan yang setara bagi masyarakat di daerah tertinggal. Mobilitas pelajar dan tenaga kerja terampil di kawasan Asia Pasifik juga mencerminkan bagaimana perubahan demografis dan ekonomi mempengaruhi pola akses terhadap pendidikan tinggi (Ashizawa & Neubauer:2023).

3. Pendidikan sebagai Penyebab Perubahan

a. Peran Sekolah dalam Melahirkan Inovasi dan Gerakan Sosial

Sekolah memiliki kapasitas untuk menjadi motor perubahan sosial melalui pengembangan agensi siswa dan pembentukan kesadaran kritis. Penelitian dalam proyek *Schools as Drivers of Change* (SADC) yang melibatkan lima sekolah Eropa menemukan bahwa siswa belajar sambil mengimplementasikan misi perubahan komunitas, di mana proses pengembangan agensi dimulai dari persiapan lingkungan yang mendukung, identifikasi keterampilan agensi siswa, hingga pelaksanaan misi perubahan komunitas

(Bunikowska & Suero Montero:2022). Program ini memberdayakan siswa untuk menjadi pelopor budaya positif dan pelindung bagi sesama, sehingga berkontribusi pada terciptanya lingkungan sekolah yang aman dan inklusif.

Penerapan program agen perubahan di berbagai sekolah di Indonesia telah menunjukkan dampak signifikan terhadap iklim keamanan sekolah dan pencegahan perundungan. Di SMP Muhammadiyah 1 Alternatif Kota Magelang, program *Agent of Change* yang digagas dan dikelola oleh Tim Bimbingan Konseling memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan rapor pendidikan terutama dalam aspek iklim keamanan sekolah. Kepala SMP Mutual, Wasiun, menjelaskan bahwa siswa menjadi lebih terbuka, saling peduli, dan lebih responsif terhadap situasi di sekitar mereka, yang berdampak langsung pada meningkatnya hasil Rapor Iklim Sekolah (Wasiun:2025). Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Zufal Abdilah, menegaskan bahwa kehadiran tim ini menjadi bagian penting dalam strategi jangka panjang sekolah untuk membangun budaya pendidikan yang berpihak pada perlindungan anak (Abdilah:2025).

Demikian pula di SMPN I Kabupaten Sorong, program agen perubahan diterapkan sebagai langkah konkret mengantisipasi adanya tindakan perundungan di sekolah, di mana program yang berjalan memberikan dampak signifikan sehingga praktik perundungan dapat ditekan secara efektif (Masumbauw:2024).

b. Sekolah sebagai "Agent of Change" dalam Pembangunan Masyarakat

Sekolah berfungsi sebagai agen perubahan ketika mampu mentransformasi norma-norma dan praktik-praktik kelembagaan yang selama ini menghambat inovasi. Kerangka *Gender at Work* menekankan bahwa perubahan organisasi—termasuk sekolah—terjadi melalui interaksi dan tekanan sinergis pada empat area kunci: kesadaran dan kapabilitas individu, sumber daya (akses

terhadap kepemimpinan dan pengembangan keterampilan), aturan formal (kebijakan dan kurikulum nasional), serta aturan informal (norma dan praktik yang tidak tertulis) (Bunikowska & Suero Montero:2022). Perubahan di tingkat individu, terutama pengembangan kesadaran kritis (*conscientização*) sebagaimana dikemukakan oleh Paulo Freire, merupakan fondasi bagi transformasi sosial yang lebih luas.

4. Krisis Relevansi Pendidikan: Kesenjangan antara Kurikulum dan Kebutuhan Dunia Kerja

Salah satu tantangan paling serius yang dihadapi dunia pendidikan saat ini adalah krisis relevansi yang ditandai dengan kesenjangan antara apa yang diajarkan di sekolah dan kebutuhan nyata dunia kerja. Fenomena ini termanifestasi dalam tingginya angka pengangguran di kalangan lulusan pendidikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2025, sebesar 153,05 juta SDM adalah pencari kerja, dengan peningkatan jumlah pengangguran absolut berbanding lurus dengan jumlah lulusan dari sekolah menengah maupun universitas (Kompas:2025). Dari latar belakang pendidikan, lulusan SMK/SMA menyumbang 14,35 persen pengangguran, dan diploma hingga doktor sebesar 11,07 persen (Kompas:2025).

Kasus kericuhan dan membeludaknya angkatan kerja dalam bursa lowongan kerja di Kabupaten Bekasi dan Batam menjadi bukti nyata bahwa jumlah pekerjaan jauh lebih kecil dari jumlah sumber daya manusia yang tersedia (Kompas:2025). Hal ini memberikan pesan penting bahwa kurikulum pendidikan ternyata makin menciptakan pengangguran, di mana konsep kurikulum *link and match* yang mengarahkan pada permintaan swasta dinilai sudah tidak relevan karena pendidikan mestinya menghasilkan karakter yang selaras dengan cita-cita nasional (Kompas:2025).

Muhammad Thamrin Hidayat menekankan bahwa kesulitan yang dihadapi adalah karakter yang dirumuskan dalam profil pelajar Pancasila hanya sebagai pelengkap dari materi pembelajaran, sehingga

tuntutan terhadap pemenuhan kompetensi pun tidak terjadi (Hidayat:2024). Ia juga menyoroti bahwa guru menghadapi tantangan dalam memenuhi tuntutan pembelajaran berbasis kognitif tingkat tinggi dengan materi yang kurang relevan, seperti menulis tegak bersambung yang sudah kehilangan relevansi di era digital (Hidayat:2024).

5. Digitalisasi Pendidikan sebagai Bentuk Perubahan Sosial

a. Dampak Positif Penggunaan Teknologi (AI, Gadget) dalam Interaksi Sosial

Digitalisasi pendidikan, termasuk pemanfaatan kecerdasan buatan (AI), telah membawa transformasi signifikan dalam proses pembelajaran. Teknologi AI memungkinkan personalisasi pembelajaran yang lebih adaptif, di mana peserta didik dapat memanfaatkan alat-alat AI untuk menyelesaikan berbagai tugas akademik tanpa bantuan manusia (Peneliti Internasional:2025). Penelitian di Georgia menemukan bahwa meskipun alat bertenaga AI sangat berharga untuk proses akademik, siswa menunjukkan kesadaran akan potensi risiko yang mempengaruhi pengembangan keterampilan sosial dan interpersonal mereka, sehingga mereka berusaha menjaga keseimbangan antara bantuan teknologi dan interaksi sosial di lingkungan akademik mereka (Peneliti Internasional:2025). Studi ini menyimpulkan bahwa penerapan AI yang seimbang dalam pendidikan dapat meningkatkan kinerja akademik siswa tanpa menghambat pengembangan keterampilan sosial mereka (Peneliti Internasional:2025).

b. Dampak Negatif Penggunaan Teknologi terhadap Interaksi Sosial

Di sisi lain, kekhawatiran tentang dampak negatif teknologi terhadap interaksi sosial siswa semakin meningkat. Penelitian oleh

Song et al. (2025) menunjukkan bahwa meskipun chatbot AI memberikan respons yang lebih informatif dan objektif dibandingkan interaksi dengan rekan sebaya, interaksi rekan sebaya dianggap lebih efektif untuk mengumpulkan respons subjektif dan menghasilkan ide-ide kreatif—tugas yang tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh chatbot AI (Song et al.:2025). Studi ini menyimpulkan bahwa ChatGPT mengungguli siswa dalam tugas menganalisis teks dan memberikan umpan balik yang luas, namun siswa menunjukkan kinerja yang lebih baik dalam mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan penyempurnaan (Song et al.:2025).

Penelitian di MIT Media Lab oleh Morris (2026) mengungkap adanya "kesenjangan kualitas kolaborasi": interaksi rekan sebaya yang berkualitas tinggi menghasilkan rasa ingin tahu dan keterlibatan yang tidak dapat ditiru oleh AI, sementara interaksi rekan sebaya yang berkualitas rendah justru kinerjanya di bawah AI. Temuan ini menunjukkan bahwa desain AI untuk pendidikan perlu mempertimbangkan aspek sosial dari pembelajaran, bukan sekadar optimalisasi hasil individu, dan mengusulkan prinsip-prinsip desain untuk sistem AI yang membuat kehadiran dan proses rekan sebaya menjadi terlihat (Morris:2026).

Studi Kasus: Transformasi Pembelajaran dari Tatap Muka menjadi Daring (Pasca Pandemi Covid-19) dan Dampaknya terhadap Interaksi Sosial Siswa

> Pandemi Covid-19 telah memaksa transformasi besar-besaran dalam sistem pendidikan global, menggeser pembelajaran dari tatap muka menjadi daring dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Transisi ini membawa konsekuensi mendalam terhadap interaksi sosial siswa, baik selama masa pandemi maupun pada periode pasca-pandemi ketika pembelajaran kembali ke mode luring.

Dampak terhadap Keterampilan Sosial

Penelitian tentang keterampilan sosial mahasiswa pasca-pandemi oleh Getut Pramesti (2024) dari Universitas Sebelas Maret menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam berbagai dimensi interaksi sosial. Studi yang membandingkan keterampilan sosial mahasiswa dalam pembelajaran daring dan luring dengan fokus pada kemampuan kognitif, persepsi kehadiran sosial, interaksi sosial, pembelajaran kolaboratif, dan kepuasan belajar menemukan bahwa kemampuan kognitif mahasiswa laki-laki dalam pembelajaran daring lebih tinggi daripada pembelajaran luring, sementara mahasiswa perempuan menunjukkan variasi yang lebih luas dalam pembelajaran luring (Pramesti:2024). Hal ini mengindikasikan bahwa mode pembelajaran memiliki pengaruh yang berbeda terhadap berbagai aspek kompetensi siswa.

Penelitian oleh Sun, Looi, Yang, dan Jia (2025) tentang pembelajaran kolaboratif berbantuan komputer (*computer-supported collaborative learning*/CSCL) selama dan setelah pandemi menyoroti pentingnya interaksi dan kognisi dalam lingkungan belajar digital. Studi ini menggunakan desain kuasi-eksperimental untuk menganalisis dan membandingkan kinerja pembelajaran dan hasil dari dua kelompok mahasiswa (total 45 orang) dalam kursus universitas 12 minggu yang disampaikan melalui pendekatan CSCL, baik selama maupun setelah pandemi (Sun, Looi, Yang, & Jia:2025). Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa yang terlibat dalam pembelajaran online penuh dengan CSCL dan mereka yang dalam pengajaran tatap muka dengan CSCL mencapai tingkat pemahaman konseptual yang serupa, namun perbedaan signifikan dalam urutan perilaku muncul antara kedua implementasi, dengan siswa menunjukkan tingkat keterlibatan yang lebih tinggi dalam kegiatan CSCL selama periode pasca-pandemi (Sun, Looi, Yang, & Jia:2025).

Tantangan dan Peluang

Transformasi pembelajaran daring membawa sejumlah tantangan serius terhadap interaksi sosial siswa. Berkurangnya interaksi tatap muka berpotensi menghambat pengembangan keterampilan sosial-emosional yang hanya dapat dibangun melalui pengalaman langsung berkomunikasi dan berkolaborasi dengan orang lain. Namun, di sisi lain, pembelajaran daring juga membuka peluang baru untuk mengembangkan literasi digital dan kemampuan belajar mandiri yang menjadi kompetensi esensial di era Revolusi Industri 4.0.

Penelitian tentang masa depan pembelajaran digital menunjukkan bahwa pandemi telah mengubah secara permanen lanskap pendidikan, di mana pendidik, mahasiswa, dan profesional lainnya melihat perlunya integrasi yang lebih seimbang antara pembelajaran daring dan luring. Pendekatan *blended learning* atau hybrid menjadi model yang semakin diadopsi untuk menggabungkan keunggulan kedua mode pembelajaran.

Pembelajaran bagi Sistem Pendidikan ke Depan

Pengalaman pandemi mengajarkan bahwa sistem pendidikan harus lebih tangguh dan adaptif terhadap guncangan eksternal. Ketergantungan berlebihan pada satu mode pembelajaran baik sepenuhnya tatap muka maupun sepenuhnya daring terbukti rentan. Pembelajaran pasca-pandemi menuntut pendekatan yang lebih fleksibel yang memungkinkan transisi mulus antara berbagai mode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kondisi.

Selain itu, perhatian khusus harus diberikan pada aspek sosial-emosional pembelajaran yang tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh teknologi. Penelitian tentang agen perubahan di sekolah menunjukkan bahwa program yang memberdayakan siswa untuk menjadi pelopor budaya positif dan mendukung sesama secara

efektif dapat mengatasi beberapa tantangan sosial yang diperparah oleh berkurangnya interaksi tatap muka selama pandemi (Wasiun:2025; Masumbauw:2024). Dengan demikian, pemulihan pasca-pandemi bukan sekadar mengembalikan status quo, tetapi juga membangun kembali ekosistem pendidikan yang lebih inklusif, humanis, dan responsif terhadap kebutuhan sosial-emosional siswa.



BAB 5

MODAL SOSIAL BUDAYA DALAM PENDIDIKAN

Pendahuluan

Keberhasilan pendidikan tidak semata-mata ditentukan oleh faktor ekonomi atau kecerdasan individual, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh sumber daya non-ekonomi yang dimiliki individu dan komunitasnya. Modal sosial dan modal budaya merupakan dua konsep kunci yang menjelaskan bagaimana jaringan, kepercayaan, norma, dan kebiasaan budaya mempengaruhi akses terhadap pendidikan serta pencapaian akademik. Bab ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana modal sosial dan modal budaya berperan dalam membentuk kesempatan dan keberhasilan pendidikan, dengan menggunakan kerangka teoritis yang dikembangkan oleh Pierre Bourdieu dan James Coleman, serta implikasinya dalam konteks masyarakat Indonesia yang beragam.

1. Konsep Modal Sosial (Pierre Bourdieu & James Coleman)

a. Modal Sosial: Relasi, Norma, dan Kepercayaan dalam Komunitas Sekolah

Modal sosial merujuk pada sumber daya yang melekat dalam jaringan hubungan sosial, norma-norma bersama, dan tingkat kepercayaan yang memfasilitasi tindakan kolektif dan koordinasi antar individu (Coleman, 1990). Dalam konteks pendidikan, modal sosial termanifestasi dalam berbagai bentuk hubungan yang saling menguntungkan antara orang tua, guru, siswa, dan masyarakat sekitar sekolah. James Coleman menekankan bahwa modal sosial sangat penting bagi anak-anak karena berfungsi sebagai sumber daya yang dapat mendukung proses sosialisasi dan pembelajaran (Coleman, 1990).

Di lingkungan sekolah, modal sosial terbangun melalui interaksi yang berkesinambungan antarwarga sekolah. Praktik budaya seperti 5S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan, Santun) merupakan salah satu bentuk manifestasi modal sosial yang memperkuat ikatan sosial dan menciptakan iklim sekolah yang harmonis. Penelitian Oktaviani (2026) menunjukkan bahwa penerapan budaya 5S melalui keteladanan guru dan pembiasaan rutin di lingkungan sekolah terbukti memperkuat karakter peduli sosial dan menciptakan suasana belajar yang lebih harmonis. Perubahan perilaku siswa yang terjadi meliputi meningkatnya kebiasaan menyapa dan memberi salam, penggunaan bahasa yang lebih sopan, tumbuhnya empati terhadap teman, serta meningkatnya kerja sama (Oktaviani, 2026).

Dalam kerangka teori pilihan rasional Coleman, individu membuat keputusan berdasarkan perhitungan keuntungan dan kerugian yang logis (Coleman, 1990). Dalam konteks pendidikan, keputusan orang tua untuk terlibat dalam kegiatan sekolah atau menjalin hubungan dengan guru didasarkan pada perhitungan bahwa

investasi sosial tersebut akan memberikan manfaat bagi keberhasilan pendidikan anak mereka.

b. Hubungan antar Orang Tua dan Guru sebagai Bentuk Modal Sosial

Hubungan antara orang tua dan guru merupakan salah satu bentuk modal sosial yang paling kritis dalam mendukung keberhasilan pendidikan siswa. Ketika orang tua dan guru menjalin komunikasi yang terbuka dan saling mendukung, tercipta lingkungan belajar yang koheren dan konsisten bagi siswa. Orang tua yang terlibat aktif dalam kegiatan sekolah, menghadiri pertemuan orang tua-guru, dan berkomunikasi secara teratur dengan guru tentang perkembangan anak memiliki kontribusi signifikan terhadap prestasi akademik siswa.

Di sisi lain, kepala sekolah dan guru berperan sebagai figur yang memberikan keteladanan bagi siswa. Kepemimpinan yang berorientasi pada pengembangan aspek kultural bukan sekadar manajerial menciptakan iklim akademik yang kondusif (Zamroni, 2016). Kepala sekolah yang bertindak sebagai pemimpin (*leader*) daripada sekadar manajer atau "bos" mampu membangun budaya sekolah yang memberdayakan seluruh warga sekolah (Zamroni, 2016). Hal ini sejalan dengan temuan bahwa iklim sekolah yang positif, yang dibangun melalui hubungan harmonis antara seluruh pemangku kepentingan, merupakan prasyarat bagi terciptanya budaya mutu (Mulyadi, 2009).

2. Konsep Modal Budaya (Bourdieu)

a. Habitus: Kebiasaan Keluarga yang Mempengaruhi Cara Belajar Siswa

Konsep habitus yang dikemukakan oleh Pierre Bourdieu merujuk pada sistem disposisi yang bertahan lama dan dapat dipindahkan, yang merupakan hasil internalisasi struktur sosial ke dalam diri individu. Habitus terbentuk melalui pengalaman sosialisasi

awal, terutama dalam lingkungan keluarga, dan mempengaruhi cara individu berpikir, merasa, bertindak, dan merespons berbagai situasi, termasuk dalam konteks pendidikan.

Dalam praktiknya, habitus keluarga tercermin dalam kebiasaan sehari-hari yang berkaitan dengan pembelajaran. Keluarga yang memiliki kebiasaan membaca, berdiskusi tentang berbagai topik, dan memberikan dorongan untuk bertanya serta berpikir kritis akan membentuk habitus yang mendukung keberhasilan akademik anak. Sebaliknya, keluarga yang tidak memiliki tradisi literasi atau kurang memberikan perhatian pada kegiatan intelektual akan membentuk habitus yang kurang mendukung prestasi akademik.

b. Distingsi: Bagaimana Selera Budaya (Seni, Bahasa, Cara Berpakaian) Menentukan Status Siswa di Sekolah

Bourdieu berpendapat bahwa selera budaya termasuk preferensi terhadap seni, musik, sastra, gaya bahasa, dan cara berpakaian berfungsi sebagai alat untuk membedakan dan memposisikan diri dalam hierarki sosial. Di lingkungan sekolah, siswa dari latar belakang keluarga dengan modal budaya tinggi cenderung memiliki selera budaya yang "sah" dan diakui secara sosial, yang memberi mereka keunggulan dalam interaksi sosial dan hubungan dengan guru.

Misalnya, siswa yang terbiasa menggunakan bahasa baku yang baik, memiliki pengetahuan tentang karya seni atau sastra klasik, dan berpakaian sesuai dengan norma yang berlaku di lingkungan sekolah sering kali lebih mudah diterima dan mendapatkan perlakuan yang lebih baik dari guru maupun teman sebaya. Sebaliknya, siswa dari latar belakang keluarga dengan modal budaya rendah mungkin mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan standar budaya yang berlaku di sekolah, yang dapat berdampak pada rasa percaya diri dan prestasi akademik mereka.

3. Reproduksi Kultural: Mengapa Anak dari Orang Tua Kaya Seringkali Lebih Berhasil di Sekolah?

Teori reproduksi Bourdieu menjelaskan mengapa ketimpangan pendidikan cenderung berlangsung secara turun-temurun. Bourdieu berargumen bahwa sekolah tidak berfungsi sebagai mesin mobilitas sosial yang netral, melainkan sebagai institusi yang mereproduksi struktur kelas sosial yang sudah ada. Hal ini terjadi karena sekolah menghargai dan memberi imbalan kepada modal budaya yang dimiliki oleh kelas dominan, sementara mengabaikan atau merendahkan modal budaya yang dimiliki oleh kelas bawah.

Anak-anak dari keluarga kaya tidak hanya memiliki akses ke sumber daya ekonomi yang lebih baik, tetapi juga memiliki modal budaya yang sesuai dengan harapan dan standar sekolah. Mereka terbiasa dengan bahasa, gaya berpikir, dan perilaku yang dihargai di sekolah, yang membuat mereka lebih mudah berhasil dalam sistem pendidikan. Sementara itu, anak-anak dari keluarga miskin mungkin memiliki modal budaya yang berbeda seperti pengetahuan tentang budaya lokal, keterampilan praktis, atau kearifan tradisional yang tidak diakui atau bahkan didevaluasi oleh sistem pendidikan formal.

Fenomena ini menjelaskan mengapa dalam masyarakat yang secara formal menjamin kesetaraan akses pendidikan, ketimpangan hasil pendidikan tetap bertahan. Sekolah, dalam perspektif Bourdieu, berpartisipasi dalam "simbolik kekerasan" dengan memberlakukan standar budaya kelas dominan sebagai sesuatu yang universal dan netral, sementara secara implisit mendiskualifikasi budaya kelas bawah.

4. Modal Sosial dalam Masyarakat Adat: Gotong Royong Membangun Sekolah

Di berbagai komunitas adat di Indonesia, modal sosial berupa gotong royong dan solidaritas komunal telah lama menjadi kekuatan dalam membangun dan mengelola fasilitas pendidikan. Tradisi gotong royong, di mana masyarakat bahu-membahu menyumbangkan tenaga,

materi, atau pikiran untuk kepentingan bersama, merupakan bentuk modal sosial yang sangat kuat dan masih lestari di banyak daerah.

Program bantuan masyarakat untuk pembangunan sekolah, perbaikan fasilitas, atau penyelenggaraan kegiatan pendidikan merupakan contoh nyata bagaimana modal sosial dapat mengatasi keterbatasan sumber daya ekonomi. Di daerah perdesaan atau terpencil, masyarakat sering kali bergotong royong membangun gedung sekolah, menyediakan makanan untuk siswa, atau secara kolektif mengawasi anak-anak dalam kegiatan belajar. Modal sosial dalam bentuk jaringan kekerabatan, kepercayaan, dan norma saling membantu ini menjadi fondasi penting bagi keberlangsungan pendidikan di komunitas adat.

Sebagai siswa, partisipasi dalam kegiatan gotong royong, rukun dengan teman sekelas, dan menyelesaikan masalah melalui musyawarah merupakan bentuk kontribusi terhadap pembangunan sosial budaya di lingkungan pendidikan (Gina, 2023). Kebiasaan tolong-menolong, gotong royong membersihkan kelas, dan kerukunan antarsiswa tidak hanya memperkuat modal sosial di sekolah tetapi juga melatih jiwa sosial yang baik sebagai bagian dari pembangunan sosial budaya yang lebih luas (Gina, 2023).

5. Strategi Mengatasi Keterbatasan Modal Budaya: Peran Guru dalam Memberikan Cultural Bridging

Guru memegang peran sentral dalam menjembatani kesenjangan modal budaya antara keluarga dan sekolah. *Cultural bridging* merujuk pada upaya guru untuk membantu siswa dari latar belakang budaya yang berbeda agar dapat mengakses dan menguasai budaya akademik yang diharapkan di sekolah, tanpa harus meninggalkan identitas budaya asli mereka.

Strategi *cultural bridging* yang dapat dilakukan guru meliputi:

a. Mengakui dan menghargai keberagaman budaya siswa dengan mengintegrasikan pengetahuan dan pengalaman budaya siswa

ke dalam proses pembelajaran, sehingga siswa merasa dihargai dan terlibat secara bermakna.

b. Mengajarkan secara eksplisit kode budaya sekolah seperti cara berbicara yang sopan, cara bertanya, cara menyelesaikan tugas, atau cara berinteraksi dengan guru yang mungkin tidak diajarkan di lingkungan keluarga siswa.

c. Menjadi teladan bagi siswa melalui sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai budaya yang positif. Sebagaimana dikemukakan oleh Zamroni (2016), kepala sekolah dan guru mutlak harus menjadi contoh atau menjadi teladan bagi siswa, sehingga siswa lebih mengikuti apa yang dilakukan guru daripada apa yang dikatakannya.

d. Membangun hubungan yang setara dan terbuka antara guru, siswa, dan orang tua. Mulyadi (2009) menekankan pentingnya hubungan yang harmonis di mana kepala sekolah dan guru bersedia mendengar dari pihak lain, tidak memberikan keputusan yang tergesa-gesa, dan lebih bersifat terbuka.

e. Memberikan perhatian khusus kepada siswa yang mengalami kesulitan karena perbedaan budaya, dengan pendekatan yang empatik dan tidak menghakimi.

Melalui *cultural bridging*, guru dapat membantu siswa mengembangkan apa yang disebut Bourdieu sebagai "modal budaya" yang diperlukan untuk berhasil di sekolah, sambil tetap menghargai dan memelihara identitas budaya asal mereka.

Studi Kasus: Fenomena "Anak Pejabat vs Anak Nelayan" dalam Persaingan Masuk Perguruan Tinggi Negeri

> Fenomena persaingan masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia sering kali mencerminkan kesenjangan modal budaya dan modal sosial antara anak-anak dari keluarga pejabat atau elite dan anak-anak dari keluarga nelayan atau petani. Analisis menggunakan konsep Bourdieu memberikan penjelasan yang

mendalam tentang mengapa ketimpangan ini terjadi dan bertahan.

Modal Sosial: Jaringan dan Akses

Anak pejabat memiliki akses ke jaringan sosial yang luas yang dapat memberikan informasi, rekomendasi, dan dukungan dalam proses seleksi masuk PTN. Orang tua mereka mungkin mengenal pejabat pendidikan, dosen, atau alumni kampus yang dapat memberikan bimbingan dan informasi strategis tentang proses penerimaan. Jaringan ini memberikan keunggulan kompetitif yang tidak tersedia bagi anak nelayan yang jaringan sosialnya terbatas pada komunitas lokal.

Modal Budaya: Habitus dan Distingsi

Anak pejabat dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang memiliki habitus yang selaras dengan budaya akademik perguruan tinggi. Mereka terbiasa dengan bahasa formal, wacana intelektual, dan gaya berpikir analitis yang dihargai dalam ujian masuk PTN. Akses mereka terhadap buku, kursus bimbingan belajar, dan lingkungan yang mendukung pembelajaran memperkuat modal budaya mereka. Sebaliknya, anak nelayan mungkin memiliki habitus yang berbeda—lebih akrab dengan pengetahuan praktis, kearifan lokal, dan gaya belajar yang lebih kontekstual—yang tidak selalu sesuai dengan format ujian nasional yang standar.

Reproduksi Ketimpangan

Sistem penerimaan PTN yang mengandalkan ujian tulis dengan konten dan format yang cenderung menguntungkan mereka yang memiliki akses ke sumber daya pendidikan berkualitas berkontribusi pada reproduksi ketimpangan sosial. Sekolah-sekolah favorit yang sebagian besar diakses oleh anak-anak dari keluarga mampu memiliki kurikulum yang lebih baik, guru yang

lebih berkualitas, dan fasilitas yang lebih memadai, yang secara langsung mempengaruhi peluang lulus ujian masuk PTN.

Strategi Mengatasi Kesenjangan

Untuk mengatasi kesenjangan ini, diperlukan kebijakan afirmatif seperti jalur masuk khusus bagi siswa dari daerah tertinggal atau keluarga kurang mampu, serta program bimbingan belajar yang dapat diakses oleh semua siswa. Selain itu, peran guru sebagai agen *cultural bridging* menjadi sangat penting untuk membantu siswa dari latar belakang kurang mampu mengembangkan modal budaya yang diperlukan untuk bersaing secara lebih setara. Keteladanan, pembiasaan, dan pendampingan yang intensif dari guru dapat membantu menjembatani kesenjangan modal budaya antara siswa dari berbagai latar belakang (Oktaviani, 2026; Zamroni, 2016).



BAB 6

KULTUR SEKOLAH DAN MUTU PENDIDIKAN

Pendahuluan

Kultur sekolah merupakan jiwa dan karakter yang melekat pada sebuah institusi pendidikan, yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan sekolah—mulai dari cara guru mengajar, cara siswa belajar, hingga hubungan antar seluruh warga sekolah. Kultur sekolah yang positif terbukti berkorelasi langsung dengan peningkatan mutu pendidikan, sementara kultur yang toksik dapat menghambat bahkan merusak upaya peningkatan mutu. Bab ini bertujuan untuk mengidentifikasi elemen-elemen budaya internal sekolah yang berkorelasi langsung dengan peningkatan atau penurunan mutu pendidikan, serta bagaimana elemen-elemen tersebut dapat dikelola untuk mencapai keunggulan pendidikan.

1. Definisi Kultur Sekolah: Artefak Fisik, Nilai-nilai, dan Asumsi Dasar

Kultur sekolah dapat didefinisikan sebagai sistem nilai, keyakinan, dan norma yang dianut bersama oleh seluruh warga sekolah dan mempengaruhi cara mereka berpikir, merasa, dan bertindak. Kultur sekolah terdiri dari tiga lapisan utama: (1) artefak

fisik, (2) nilai-nilai yang diproklamasikan, dan (3) asumsi dasar yang tidak disadari.

a. Artefak Fisik

Artefak fisik mencakup elemen-elemen yang terlihat dan teraba di lingkungan sekolah, seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, tata letak bangunan, kebersihan lingkungan, hiasan dinding, dan fasilitas lainnya. Kondisi fisik sekolah mencerminkan nilai-nilai yang dianut oleh institusi tersebut. Sekolah yang rapi, bersih, dan tertata dengan baik menunjukkan penghargaan terhadap disiplin dan kenyamanan belajar. Penampilan fisik sekolah yang baik juga merupakan indikator budaya mutu yang tercermin dalam usaha optimalisasi pemanfaatan fasilitas, perawatan, pemantauan, dan evaluasi (Hasan, 2006).

b. Nilai-nilai (Visi dan Misi)

Nilai-nilai yang diproklamasikan tercermin dalam visi, misi, slogan, dan aturan-aturan yang dicanangkan oleh sekolah. Visi dan misi sekolah yang jelas dan terimplementasi dalam program atau kegiatan sekolah serta strategi pembelajaran yang diterapkan merupakan indikator budaya mutu (Hasan, 2006). Nilai-nilai ini menjadi pedoman bagi perilaku seluruh warga sekolah dan membentuk identitas kolektif institusi.

c. Asumsi Dasar

Asumsi dasar merupakan keyakinan yang tidak disadari dan dianggap sudah semestinya (taken for granted) oleh seluruh warga sekolah. Misalnya, keyakinan guru tentang kemampuan siswa apakah semua siswa dapat belajar, apakah siswa dari latar belakang tertentu kurang mampu, atau apakah siswa perlu diberi hukuman untuk menjadi disiplin sangat mempengaruhi cara guru berinteraksi dengan siswa dan merancang pembelajaran. Asumsi dasar ini adalah lapisan

kultur yang paling dalam dan paling sulit diubah, namun memiliki pengaruh paling kuat terhadap perilaku sehari-hari di sekolah.

2. Komponen Pembentuk Kultur Sekolah

a. Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah

Kepala sekolah merupakan aktor sentral dalam pembentukan dan pengembangan kultur sekolah. Gaya kepemimpinan yang diterapkan kepala sekolah sangat mempengaruhi iklim kerja dan belajar di sekolah. Kepemimpinan yang efektif untuk pengembangan kultur sekolah adalah kepemimpinan yang berorientasi pada aspek kultural, di mana kepala sekolah bertindak sebagai pemimpin (*leader*) yang memberikan contoh, inspirasi, dan pemberdayaan, bukan sebagai "bos" atau manajer yang hanya mengandalkan otoritas struktural (Zamroni, 2016).

Kepala sekolah di SDN Kepuhteluk II Gresik, misalnya, cenderung berperan sebagai pemimpin daripada manajer karena sekolah berusaha membangun aspek kultural, karena pemimpin bersifat kultural (Zamroni, 2016). Hal ini menciptakan iklim akademik yang kondusif karena kepala sekolah tidak bertindak sebagai "bos" yang mendominasi, melainkan sebagai figur yang memberdayakan seluruh warga sekolah.

Kepala sekolah yang efektif juga harus menjadi teladan bagi siswa dan guru. Sebagaimana ditegaskan oleh Zamroni (2016), untuk mencapai sekolah yang efektif, kepala sekolah dan guru mutlak harus menjadi contoh atau menjadi teladan bagi siswa, sehingga siswa lebih mengikuti apa yang dilakukan kepala sekolah dan guru daripada apa yang dikatakannya.

b. Profesionalisme dan Kolaborasi Guru (Komunitas Belajar/PLC)

Profesionalisme guru dan kolaborasi di antara mereka merupakan komponen penting dalam membangun kultur sekolah

yang berkualitas. Guru yang profesional tidak hanya menguasai materi pelajaran dan pedagogi, tetapi juga memiliki komitmen terhadap pengembangan diri dan peningkatan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan.

Komunitas Belajar Profesional atau *Professional Learning Community* (PLC) merupakan wadah bagi guru untuk berkolaborasi, berbagi praktik baik, dan saling belajar untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Dalam PLC, guru bekerja sama dalam merancang pembelajaran, menganalisis hasil belajar siswa, dan mencari solusi atas tantangan yang dihadapi. Budaya kolaborasi ini menciptakan sinergi yang mendorong peningkatan mutu secara kolektif.

Sistem dan prosedur kerja sekolah yang mendukung profesionalisme guru tercermin dalam sistem penghargaan bagi siswa dan guru, serta upaya-upaya peningkatan profesional guru (Hasan, 2006). Penghargaan bagi guru yang berprestasi dan suasana yang mendukung pengembangan diri menjadi pendorong bagi peningkatan kualitas mengajar.

c. Disiplin dan Kebiasaan Belajar Siswa

Disiplin dan kebiasaan belajar siswa merupakan komponen kultur sekolah yang sangat penting karena secara langsung mempengaruhi hasil belajar. Tata tertib sekolah yang diterapkan dengan konsisten dan melibatkan seluruh warga sekolah dalam pembuatannya menciptakan rasa kepemilikan dan kepatuhan yang lebih tinggi (Hasan, 2006).

Kebiasaan belajar yang positif, seperti datang tepat waktu, menyelesaikan tugas dengan baik, aktif dalam diskusi, dan gemar membaca, dibangun melalui pembiasaan yang konsisten di lingkungan sekolah. Sekolah yang berhasil membangun budaya disiplin dan kebiasaan belajar yang baik akan melihat dampaknya pada peningkatan prestasi akademik siswa.

3. Kultur Positif vs Kultur Toksik

Kultur Positif yang Mendukung Prestasi

Kultur sekolah yang positif memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

a. Rasa Aman dan Nyaman: Siswa dan guru merasa aman secara fisik dan psikologis di sekolah. Tidak ada rasa takut akan perundungan, intimidasi, atau kekerasan. Suasana sekolah yang damai, tertib, dan penuh kekeluargaan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajar (Hasan, 2006).

b. Penghargaan atas Prestasi: Sekolah memberikan pengakuan dan penghargaan kepada siswa dan guru yang berprestasi, sehingga memotivasi seluruh warga sekolah untuk terus meningkatkan kinerja mereka.

c. Keterbukaan dan Komunikasi yang Setara: Terdapat komunikasi yang terbuka antara kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua. Keputusan diambil melalui proses yang partisipatif dan melibatkan semua pemangku kepentingan.

d. Hubungan yang Harmonis: Terjalin hubungan yang saling menghormati, akrab, dan penuh kekeluargaan di antara seluruh warga sekolah (Mulyadi, 2009).

Kultur Toksik yang Menghambat Prestasi

Kultur sekolah yang toksik atau meracuni memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

a. Perundungan (*Bullying*): Praktik perundungan yang dibiarkan terjadi di lingkungan sekolah menciptakan rasa takut dan tidak aman bagi siswa, yang mengganggu konsentrasi dan motivasi belajar.

b. Ketakutan dan Intimidasi: Siswa atau guru yang takut untuk bertanya, mengemukakan pendapat, atau melaporkan masalah karena khawatir akan mendapat sanksi atau hukuman.

c. Birokrasi yang Kaku: Sistem dan prosedur yang terlalu birokratis, kaku, dan tidak responsif terhadap kebutuhan siswa dan guru. Kepala sekolah yang menjauhkan diri dari staf dan hanya bertemu pada waktu pertemuan mingguan menciptakan

budaya kerja birokrasi yang menghambat inovasi (Mulyadi, 2009).

d. Ketidakjujuran: Nilai-nilai fundamental seperti kejujuran belum terwujud dalam kepribadian siswa. Sebagaimana ditemukan di SDN Kepuhteluk II Gresik, masih ada siswa yang melakukan kecurangan dalam transaksi jual beli di kantin kejujuran, menunjukkan bahwa budaya jujur belum sepenuhnya tertanam (Zamroni, 2016).

e. Kurangnya Teladan: Kepala sekolah atau guru yang tidak memberikan contoh perilaku yang baik bagi siswa, sehingga terjadi kesenjangan antara apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan.

4. Hubungan Kultur Sekolah dengan Mutu (Output)

a. Pengaruh Iklim Sekolah terhadap Motivasi Belajar dan Hasil Ujian

Iklim sekolah yang positif memiliki pengaruh yang signifikan terhadap motivasi belajar siswa dan hasil ujian. Siswa yang belajar di lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung cenderung lebih termotivasi untuk belajar dan berprestasi. Sebaliknya, iklim sekolah yang negative ditandai dengan perundungan, ketakutan, dan ketidakadilan menurunkan motivasi belajar dan berdampak buruk pada hasil ujian.

Asesmen Nasional yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan mengukur berbagai aspek mutu pendidikan, termasuk hasil belajar siswa, iklim keamanan sekolah, dan kualitas pembelajaran. Hasil asesmen menunjukkan bahwa sekolah dengan iklim keamanan yang baik di mana siswa merasa aman dari perundungan, diskriminasi, dan kekerasan cenderun memiliki hasil belajar yang lebih tinggi.

b. Konsep "Total Quality Management" (TQM) dalam Pendidikan

Total Quality Management (TQM) adalah pendekatan manajemen yang berfokus pada peningkatan kualitas secara berkelanjutan dengan melibatkan seluruh anggota organisasi. Dalam konteks pendidikan, TQM diterapkan melalui upaya peningkatan mutu yang komprehensif, mencakup perbaikan manajemen sekolah dan pengembangan kultur sekolah (Zamroni, 2016).

Beberapa model peningkatan mutu pendidikan yang telah diterapkan di Indonesia mencakup (Zamroni, 2016):

1) Model Reformasi: Menekankan pada perbaikan aspek proses (manajemen sekolah dan proses pembelajaran) dan penetapan standar untuk keperluan *benchmarking*.
2) Desentralisasi: Pelimpahan kewenangan pengelolaan pendidikan kepada daerah dan sekolah atau satuan pendidikan.
3) Penerapan Standar Nasional Pendidikan: Dengan 8 standar yang ditetapkan melalui Permendiknas.
4) MPMBS, Sekolah Mandiri, SSN, RSBI: Tahapan pengembangan sekolah dari Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah hingga Sekolah Bertaraf Internasional.

Dalam upaya menerapkan budaya kualitas secara menyeluruh, terdapat enam nilai yang harus dijadikan prinsip dasar bagi pimpinan organisasi pendidikan (Mulyadi, 2009):

1) Kedudukan dalam organisasi penyelenggara dan pengguna pendidikan diposisikan sama.
2) Keterbukaan antara bawahan dan atasan adalah setara.
3) Hubungan yang harmonis.
4) Fokus pada proses.
5) Penghargaan pada kontribusi semua individu.
6) Perbaikan berkelanjutan.

5. Peran Hidden Curriculum (Kurikulum Tersembunyi)

Hidden curriculum atau kurikulum tersembunyi merujuk pada pesan-pesan, nilai-nilai, dan norma yang tidak secara eksplisit diajarkan dalam kurikulum formal, tetapi diinternalisasi oleh siswa melalui berbagai aspek kehidupan sekolah. Kurikulum tersembunyi memiliki pengaruh yang sangat besar dalam membentuk sikap dan perilaku siswa.

a. Kepatuhan

Kurikulum tersembunyi dapat membentuk sikap kepatuhan yang berlebihan pada siswa. Melalui aturan-aturan yang kaku, tata tertib yang menghukum, dan sistem reward-punishment yang mengutamakan kepatuhan daripada kreativitas, siswa belajar bahwa yang terpenting adalah mengikuti aturan, bukan berpikir kritis atau berinovasi. Hal ini dapat menghasilkan lulusan yang patuh tetapi pasif dan kurang inisiatif.

b. Kreativitas

Sebaliknya, kurikulum tersembunyi juga dapat membentuk sikap kreatif jika sekolah memberikan ruang bagi siswa untuk bereksperimen, mengambil risiko, dan belajar dari kegagalan. Lingkungan yang mendukung kebebasan berekspresi dan menghargai ide-ide baru akan menumbuhkan kreativitas siswa.

c. Sikap Kritis

Kurikulum tersembunyi dapat membentuk sikap kritis jika sekolah membiasakan siswa untuk bertanya, mempertanyakan, dan menganalisis informasi secara mendalam. Guru yang mendorong diskusi terbuka, debat, dan pemecahan masalah akan menumbuhkan kemampuan berpikir kritis siswa. Sebaliknya, guru yang hanya mentransfer pengetahuan dan menghukum siswa yang bertanya akan menekan sikap kritis.

Kesadaran akan peran kurikulum tersembunyi penting bagi pendidik agar mereka dapat secara sadar merancang lingkungan belajar yang mendukung pengembangan kepribadian siswa yang diinginkan. Atmosfer akademik yang kuat, di mana kemampuan berpikir logis dan kritis dibangun melalui budaya akademik yang tumbuh dengan baik, membuat pengalaman belajar menjadi sangat bermakna (Mu'ti, 2026).

Studi Kasus: Perbandingan Kultur Sekolah di Sekolah Alam (Bebas) dengan Sekolah Unggulan Berbasis Kedisiplinan Tinggi (Militeristik)

Sekolah Alam: Kebebasan dan Kreativitas

Sekolah Alam mengusung pendekatan pembelajaran yang berbasis pada alam dan pengalaman langsung. Kultur sekolah di Sekolah Alam ditandai oleh:

1) Artefak Fisik: Lingkungan belajar yang terbuka, dengan banyak area hijau, kebun, dan ruang terbuka yang mendukung eksplorasi. Ruang kelas tidak selalu berbentuk ruangan tertutup, melainkan dapat berupa area di bawah pohon atau di tepi sawah.
2) Nilai-nilai: Kebebasan untuk bereksplorasi, belajar dari pengalaman, menghargai alam, dan mengembangkan potensi unik setiap anak. Siswa didorong untuk bertanya, mencari tahu, dan menemukan jawaban sendiri.
3) Asumsi Dasar: Keyakinan bahwa setiap anak memiliki potensi yang unik dan akan berkembang optimal jika diberi kebebasan dan lingkungan yang mendukung. Guru berperan sebagai fasilitator, bukan otoritas tunggal pengetahuan.
4) Dampak terhadap Karakter: Sekolah Alam cenderung menghasilkan siswa yang kreatif, mandiri, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, dan peduli terhadap lingkungan. Namun, potensi kelemahannya adalah kurangnya kedisiplinan dan kemampuan beradaptasi dengan struktur yang lebih formal di jenjang pendidikan selanjutnya.

Sekolah Unggulan Militeristik: Kedisiplinan dan Prestasi

Sekolah unggulan dengan pendekatan militeristik menekankan pada kedisiplinan, kepatuhan, dan pencapaian prestasi akademik yang tinggi. Kultur sekolah ini ditandai oleh:

1) Artefak Fisik: Lingkungan yang tertata rapi, seragam yang seragam, jadwal yang ketat, dan simbol-simbol kebanggaan seperti piala dan piagam penghargaan yang dipajang di area publik.
2) Nilai-nilai: Kedisiplinan, kerja keras, kompetisi, dan prestasi akademik sebagai indikator utama keberhasilan. Siswa dilatih untuk patuh pada aturan dan menghormati hierarki.
3) Asumsi Dasar: Keyakinan bahwa kedisiplinan yang ketat dan standar yang tinggi adalah kunci keberhasilan. Guru berperan sebagai otoritas yang harus dihormati dan dipatuhi.
4) Dampak terhadap Karakter: Sekolah militeristik cenderung menghasilkan siswa yang disiplin, teratur, memiliki etos kerja yang kuat, dan berprestasi secara akademik. Namun, potensi kelemahannya adalah kurangnya kreativitas, kemandirian berpikir, dan kemampuan untuk mengambil inisiatif. Siswa mungkin juga mengalami stres dan kecemasan akibat tekanan untuk selalu berprestasi.
5) Analisis Mana yang Lebih Berhasil Membentuk Karakter?
6) Keberhasilan pembentukan karakter tidak dapat diukur secara tunggal karena karakter memiliki banyak dimensi, termasuk disiplin, kreativitas, tanggung jawab, empati, dan integritas. Kedua model kultur sekolah memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing:
7) Sekolah Alam lebih berhasil dalam mengembangkan kreativitas, kemandirian, dan kecintaan terhadap alam. Siswa belajar untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang memiliki rasa ingin tahu dan kemampuan beradaptasi yang baik.
8) Sekolah Militeristik lebih berhasil dalam mengembangkan disiplin, ketekunan, dan orientasi pada prestasi. Siswa belajar untuk bekerja keras, mengelola waktu, dan mencapai target.

Pendekatan yang paling ideal adalah mengintegrasikan elemen positif dari kedua model. Sekolah yang efektif adalah sekolah yang mampu menciptakan keseimbangan antara kebebasan dan struktur, antara kreativitas dan disiplin, serta antara prestasi akademik dan pengembangan karakter holistik. Sebagaimana ditekankan oleh Mulyadi (2009), budaya mutu dibangun melalui hubungan yang harmonis, keterbukaan, dan penghargaan terhadap proses bukan sekadar hasil akhir.

Selain itu, aspek fundamental seperti kejujuran perlu menjadi pilar budaya sekolah. Zamroni (2016) menyoroti bahwa nilai kejujuran yang menjadi salah satu inti pilar akhlak, pilar karakter, dan pilar budaya sekolah sangat penting untuk ditanamkan. Orang yang jujur, di mana pun, pasti jujur, jika kejujuran sudah menjadi nilai yang melekat dalam dirinya.



BAB 7
ISU-ISU SOSIAL BUDAYA DALAM PENDIDIKAN

Pendahuluan

Ruang pendidikan merupakan cermin dari dinamika sosial budaya masyarakat yang lebih luas. Keberagaman suku, agama, ras, dan latar belakang sosial ekonomi peserta didik menghadirkan potensi pengayaan sekaligus tantangan serius bagi penyelenggaraan pendidikan yang adil dan humanis. Bab ini bertujuan untuk menganalisis berbagai masalah sosial kontemporer yang muncul di ruang-ruang pendidikan akibat keberagaman dan ketimpangan, serta mengidentifikasi strategi-strategi untuk mengelola tantangan tersebut dalam kerangka pendidikan yang inklusif dan berkeadilan.

1. Pendidikan Multikultural: Mengelola Keberagaman Suku, Agama, dan Ras di dalam Kelas

Indonesia sebagai bangsa yang kaya akan keberagaman budaya, agama, suku, dan bahasa menghadapi tantangan besar dalam menjaga persatuan dan harmoni sosial di tengah keanekaragaman tersebut. Multikulturalisme di Indonesia merupakan suatu keniscayaan yang harus diterima dan dikembangkan untuk menciptakan kehidupan yang harmonis. Penelitian oleh Jeesica Shinta dan Meyniar Albina (2024) menunjukkan bahwa pendidikan multikulturalisme mampu

menanamkan nilai-nilai toleransi, saling menghormati, dan kebersamaan, yang merupakan dasar penting untuk menciptakan harmoni sosial (Shinta & Albina:2024). Namun, implementasinya menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman konsep multikulturalisme, keterbatasan fasilitas pembelajaran, dan sikap eksklusif di masyarakat (Shinta & Albina:2024).

Pendidikan multikultural memiliki peran strategis dalam membangun kesatuan di tengah keanekaragaman. Penelitian oleh I Gusti Ayu Trisna Puspita Dewi, I Wayan Lasmawan, dan I Wayan Kertih (2024) menegaskan bahwa pendidikan multikultural melalui pembelajaran IPS di sekolah dasar bertujuan membentuk siswa yang dapat menerima, menghargai, dan menghormati keberagaman yang ada, baik suku, agama, budaya, maupun bahasa (Dewi, Lasmawan, & Kertih:2024). Keberhasilan pendidikan multikultural ditandai dengan terbentuknya masyarakat yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap toleran, sehingga mampu menciptakan hubungan sosial yang harmonis tanpa konflik yang disebabkan oleh perbedaan identitas.

Untuk mengatasi tantangan implementasi, Shinta dan Albina (2024) merekomendasikan pelatihan guru, pengembangan materi ajar berbasis budaya lokal, dialog antarbudaya, serta pemanfaatan teknologi digital secara inklusif. Dengan pendekatan yang tepat, pendidikan multikulturalisme dapat menjadi instrumen yang efektif dalam membangun masyarakat yang inklusif, harmonis, dan bersatu (Shinta & Albina:2024). Implementasi pendidikan multikultural melalui mata pelajaran seperti Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Sejarah, dan Seni Budaya terbukti efektif dalam menanamkan nilai-nilai karakter.

2. Ketimpangan Pendidikan (Education Gap): Perbedaan Akses Mutu antara Sekolah di Daerah 3T dan Kota Besar

Ketimpangan pendidikan merupakan salah satu isu paling mendesak dalam sistem pendidikan nasional. Di wilayah tertinggal,

terdepan, dan terluar (3T), sekolah rusak, keterbatasan guru, minimnya akses internet, serta jauhnya jarak tempuh menuju sekolah masih menjadi realitas sehari-hari. Berdasarkan data Pusat Asesmen Pendidikan Kemdikbud (2024), masih banyak sekolah di Indonesia, terutama yang berada di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan anggaran, yang belum memiliki jaringan internet yang stabil dan berkecepatan tinggi, dengan 75 satuan pendidikan dari total 421 satuan pendidikan sampel PISA 2025 terdata memiliki jaringan internet kurang memadai (Pusmendik:2024). Hal ini tentu saja menjadi kendala serius dalam pelaksanaan asesmen berbasis komputer sekaligus mencerminkan kesenjangan infrastruktur digital antar wilayah.

Fakta-fakta ketimpangan ini sangat memprihatinkan. Data menunjukkan bahwa ribuan sekolah di wilayah 3T masih mengalami keterbatasan fasilitas dasar, dengan lebih dari 33 ribu sekolah menghadapi keterbatasan sarana pendidikan. Masalah lain yang tidak kalah penting adalah distribusi guru yang belum merata. Banyak guru berkualitas menumpuk di wilayah perkotaan, sementara sekolah-sekolah di daerah terpencil kekurangan tenaga pengajar.

Dalam perspektif teori *human capital* dari Theodore Schultz dan Gary Becker, investasi pendidikan merupakan faktor utama peningkatan produktivitas manusia dan pertumbuhan ekonomi. Negara yang gagal memberikan akses pendidikan berkualitas secara merata akan menghadapi stagnasi pembangunan manusia. Dalam konteks Indonesia, daerah 3T menjadi ujian nyata apakah pembangunan pendidikan benar-benar inklusif atau hanya berkembang di pusat-pusat kota.

3. Perundungan (Bullying) dan Kekerasan di Sekolah: Analisis Sosiologis Relasi Kuasa dan Mekanisme Pencegahannya

Perundungan di sekolah merupakan fenomena sosial yang menunjukkan adanya ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan

korban. Penelitian oleh Syofian Hari Prasetiyo dan Lukas Purwoto (2025) dalam Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan bahwa jenis perundungan yang menonjol dijumpai adalah perundungan verbal dan relasional (Prasetiyo & Purwoto:2025). Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa iklim sekolah yang positif menurunkan kemungkinan para pelajar untuk menjadi korban perundungan, dan iklim sekolah yang positif serta pemantauan orang tua mengurangi kemungkinan pelajar untuk menjadi pelaku perundungan (Prasetiyo & Purwoto:2025).

Penelitian Julianto, Sri Haritni, dan Vinida Marpaung (2024) di salah satu SMA di Medan menunjukkan bahwa terdapat korelasi negatif antara persepsi iklim sekolah dengan intensitas perilaku perundungan, di mana semakin kuat persepsi iklim sekolah yang positif, semakin rendah kemungkinan siswa menunjukkan perilaku perundungan (Julianto, Haritni, & Marpaung:2024). Penelitian lain oleh Kurniawan dan Astuti (2021) terhadap 136 siswa menemukan bahwa iklim sekolah memiliki peran signifikan terhadap perilaku perundungan.

Meskipun pemerintah telah mengeluarkan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan yang mewajibkan setiap sekolah membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK), efektivitasnya masih terhambat. Penelitian di SMA Semarang menunjukkan bahwa pembentukan TPPK mampu meminimalkan tindakan kekerasan dan perilaku perundungan di sekolah, namun TPPK yang telah dibentuk belum sepenuhnya efektif karena masih banyak kasus kekerasan yang terjadi (Peneliti:2025). Hal ini menunjukkan bahwa peran anggota TPPK masih perlu ditingkatkan melalui pelatihan keterampilan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah (Peneliti:2025).

Pencegahan perundungan dapat dilakukan melalui berbagai strategi, termasuk pendidikan karakter, kampanye kesadaran rutin, pembentukan satuan tugas anti-perundungan dan kekerasan bekerja

sama dengan OSIS, serta penerapan sistem pengurangan poin yang dapat berujung pada skorsing bagi pelaku.

4. Erosi Nilai Moral: Degradasi Sopan Santun dan Etika Komunikasi Akibat Gawai

Era digital telah membawa perubahan mendasar dalam pola komunikasi dan interaksi sosial generasi muda. Fenomena *digital natives* generasi yang tumbuh bersama teknologi digital—menghadapi tantangan serius dalam hal degradasi sopan santun dan etika komunikasi. Penggunaan gawai yang intensif, terutama media sosial dan aplikasi pesan instan, telah mengubah cara generasi muda berkomunikasi, sering kali mengabaikan norma-norma kesopanan dan etika yang sebelumnya dijunjung tinggi dalam interaksi tatap muka.

Fenomena ini tercermin dalam berbagai perilaku seperti penggunaan bahasa yang kasar atau tidak sopan dalam percakapan daring, kurangnya kemampuan mendengarkan secara aktif, menurunnya empati dalam interaksi virtual, serta kecenderungan untuk menyampaikan pendapat tanpa mempertimbangkan perasaan orang lain. Budaya *cancel* dan perundungan daring (*cyberbullying*) merupakan manifestasi ekstrem dari erosi nilai moral ini.

Tantangan erosi nilai moral menuntut pendekatan pendidikan yang menekankan kembali pentingnya pendidikan karakter dan etika komunikasi, baik dalam interaksi daring maupun luring. Sekolah perlu mengintegrasikan pengembangan keterampilan sosial-emosional dan etika digital ke dalam kurikulum, serta memberikan keteladanan dalam penggunaan teknologi yang bertanggung jawab.

5. Pendidikan Inklusif: Tantangan Mengintegrasikan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dalam Sistem Pendidikan Reguler

Pendidikan inklusif merupakan komitmen nasional untuk memberikan hak yang sama bagi setiap anak, termasuk Anak

Berkebutuhan Khusus (ABK), untuk memperoleh pendidikan bermutu tanpa diskriminasi. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen memberikan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus melalui penguatan berbagai layanan, termasuk pendidikan inklusi, sekolah luar biasa, dan pendidikan berbasis masyarakat.

Pemerintah menjalankan tiga strategi utama dalam penguatan layanan pendidikan bagi ABK: pertama, memperkuat pendidikan inklusif di sekolah umum; kedua, meningkatkan kapasitas sekolah luar biasa; dan ketiga, mengembangkan pendidikan inklusi berbasis masyarakat. Pendidikan inklusif bertujuan agar anak berkebutuhan khusus dapat belajar bersama peserta didik lainnya, sehingga tumbuh rasa percaya diri sekaligus meningkatkan sikap empati di lingkungan sekolah.

Namun, implementasi pendidikan inklusif menghadapi berbagai tantangan signifikan. Abdul Mu'ti menyoroti masih adanya stigma di sebagian masyarakat yang memandang ABK secara keliru, sehingga sebagian keluarga cenderung menutup kondisi anaknya. Stigma ini menghambat akses ABK terhadap layanan pendidikan yang tepat dan memperkuat diskriminasi. Selain itu, kesiapan sekolah reguler dalam menerima ABK masih terbatas, baik dari segi fasilitas fisik yang ramah disabilitas, ketersediaan guru pendamping khusus, maupun pemahaman guru tentang pendekatan pembelajaran yang diferensiasi.

Untuk mendukung akses pendidikan bagi ABK, pemerintah telah menyempurnakan sistem penerimaan murid baru dengan empat jalur, termasuk jalur afirmasi yang memberikan prioritas bagi siswa dari keluarga kurang mampu serta ABK agar memperoleh akses pendidikan yang lebih luas.

6. Politik Identitas dan Radikalisme: Deradikalisasi melalui Pembelajaran

Sekolah memiliki kerentanan untuk menjadi sasaran penyebaran paham intoleransi dan radikalisme. Penelitian oleh Hasanuddin (2024) tentang konsep kebijakan dan implementasi pendidikan multikultural di Indonesia menyoroti pentingnya pendekatan multikultural dalam mencegah penyebaran paham intoleransi di lingkungan pendidikan (Hasanuddin:2024). Pendidikan multikultural dan penguatan nilai-nilai kebangsaan merupakan strategi utama deradikalisasi melalui pembelajaran.

Dalam konteks Indonesia, pendidikan agama dan kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai toleransi, menghormati perbedaan, dan menolak segala bentuk ekstremisme. Pendekatan yang efektif meliputi pengembangan keterampilan berpikir kritis, dialog antaragama dan antarbudaya, serta penguatan identitas kebangsaan yang inklusif.

Studi Kasus: Konflik Antar Pelajar yang Dipicu oleh Perbedaan Latar Belakang Organisasi Keagamaan di Sekolah Umum

> Konflik antar pelajar yang dipicu oleh perbedaan latar belakang organisasi keagamaan merupakan fenomena yang mencerminkan bagaimana identitas keagamaan dapat menjadi sumber ketegangan di lingkungan pendidikan. Konflik semacam ini sering kali berakar pada polarisasi di masyarakat yang terbawa ke lingkungan sekolah, serta kurangnya pemahaman tentang nilai-nilai toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan.
>
> Secara sosiologis, konflik berbasis identitas keagamaan di sekolah dapat dipahami sebagai manifestasi dari benturan antara kelompok yang memiliki klaim kebenaran eksklusif. Sekolah, sebagai ruang publik yang seharusnya netral dan inklusif, menjadi

arena di mana ketegangan identitas ini muncul dan kadang-kadang memuncak menjadi konflik terbuka.

Mekanisme pencegahan konflik semacam ini memerlukan pendekatan yang komprehensif. Pertama, penguatan pendidikan multikultural yang menekankan penghargaan terhadap keragaman dan pengembangan sikap toleransi. Kedua, pengembangan dialog antaragama dan antarbudaya di lingkungan sekolah sebagai sarana untuk membangun pemahaman bersama. Ketiga, penguatan peran guru sebagai fasilitator yang mampu mengelola perbedaan dan mencegah eskalasi konflik. Keempat, pengembangan kebijakan sekolah yang tegas terhadap segala bentuk intoleransi dan diskriminasi berbasis identitas.



BAB 8

TANTANGAN PENDIDIKAN DI ERA GLOBAL

Pendahuluan

Era globalisasi dan revolusi teknologi telah mengubah lanskap pendidikan secara fundamental. Arus informasi yang deras, kompetisi global yang semakin ketat, dan transformasi digital yang terus berakselerasi menghadirkan peluang sekaligus ancaman bagi sistem pendidikan nasional. Bab ini bertujuan untuk memetakan berbagai tantangan yang dihadapi pendidikan Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi dan kemajuan teknologi, serta mengidentifikasi strategi-strategi adaptasi yang diperlukan untuk menjaga relevansi dan daya saing sistem pendidikan nasional.

1. Globalisasi dan Standar Pendidikan: Pengaruh PISA terhadap Kebijakan Kurikulum di Indonesia

Programme for International Student Assessment (PISA) yang diselenggarakan oleh OECD telah menjadi tolok ukur penting bagi kualitas pendidikan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Kepala Pusat Asesmen Pendidikan, Asrijanty, Ph.D., menjelaskan bahwa pendataan sekolah sampel merupakan langkah awal yang sangat penting dalam pelaksanaan PISA, untuk memastikan bahwa sampel yang diambil benar-benar representatif dan dapat memberikan

gambaran yang akurat tentang kualitas pendidikan di Indonesia (Pusmendik:2024).

Hasil PISA Indonesia yang masih berada di peringkat bawah kelompok negara peserta telah mendorong berbagai reformasi kebijakan kurikulum. Analisis Pojok Satu (2025) mengidentifikasi beberapa faktor penyebab rendahnya skor PISA Indonesia: (1) kurikulum tidak menekankan literasi dan numerasi kontekstual, (2) siswa jarang dilatih menyelesaikan soal berbasis situasi nyata, (3) ketimpangan fasilitas sekolah antar daerah sangat besar, dan (4) banyak guru belum mendapat pelatihan pengajaran berbasis kompetensi (Pojok Satu:2025). Semua faktor ini menjelaskan mengapa kemampuan dasar siswa lemah dan terus terbawa hingga jenjang SMA, seperti tercermin dalam hasil Tes Kemampuan Akademik 2025 (Pojok Satu:2025).

Data dari Pusat Asesmen Pendidikan menunjukkan bahwa hampir seluruh materi tes PISA sudah dimuat dalam kurikulum pendidikan Indonesia. Namun, tantangan utama bukan terletak pada keberadaan materi dalam kurikulum, melainkan pada kualitas implementasi pembelajaran di kelas. Meskipun materi literasi matematika PISA dinilai memiliki relevansi sangat tinggi dengan kesiapan hidup siswa, hasil PISA Indonesia masih rendah karena faktor-faktor seperti kualitas guru, metode pembelajaran, dan kesiapan siswa dalam menghadapi soal-soal yang menuntut penalaran tingkat tinggi.

2. Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0: Keterampilan Abad 21 (4C)

Revolusi Industri 4.0 dan konsep Society 5.0 menuntut transformasi mendasar dalam sistem pendidikan. Keterampilan Abad 21 yang dikenal dengan 4C—*Critical Thinking* (Berpikir Kritis), *Creativity* (Kreativitas), *Communication* (Komunikasi), dan *Collaboration* (Kolaborasi)—telah menjadi kompetensi inti yang harus dikembangkan melalui pendidikan (Susilo & Daud:2026).

Penelitian oleh Mohamad Joko Susilo dan Nurawalianah B. A. Daud (2026) menunjukkan bahwa kurikulum yang digunakan dalam Pendidikan Agama Islam cenderung berpusat pada metode hafalan dan metode ceramah, sehingga sering dianggap kurang relevan dengan kebutuhan peserta didik dalam menghadapi perkembangan zaman (Susilo & Daud:2026). Namun, literatur juga menunjukkan adanya peluang akan integrasi kompetensi pada abad ke-21 yang sejalan dengan nilai-nilai dasar yang diajarkan dalam Pendidikan Agama Islam (Susilo & Daud:2026).

Kompetensi Abad 21 terbagi menjadi tiga kategori utama:

a. Keterampilan Belajar (*Learning Skills*): Mencakup 4C yang mengajarkan proses mental yang diperlukan untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja modern. Kemampuan berpikir kritis membantu menyelesaikan masalah dan menemukan solusi, kreativitas digunakan untuk menemukan inovasi, sementara kolaborasi dan komunikasi digunakan untuk kemampuan bersosialisasi.
b. Keterampilan Literasi (*Literacy Skills*): Berfokus pada kemampuan membedakan fakta, menentukan sumber informasi, menangkal hoaks, dan memahami teknologi di balik informasi. Ini mencakup literasi informasi, literasi media, dan literasi teknologi.
c. Keterampilan Hidup (*Life Skills*): Mencakup fleksibilitas, kepemimpinan, inisiatif, produktivitas, dan keterampilan sosial yang memungkinkan individu bertahan dan berkembang dalam lingkungan profesional.

Pergeseran dari penguatan karakter melalui Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) menuju 8 Dimensi Profil Lulusan (DPL) merupakan respons terhadap tuntutan kompetensi Abad 21. Dimensi ini tidak hanya menekankan penguatan karakter, tetapi juga mencakup keterampilan, sikap, serta kompetensi holistik yang dibutuhkan peserta didik untuk menghadapi era globalisasi, transformasi digital, dan dinamika sosial budaya.

3. Tantangan Profesi Guru di Era Digital: Guru vs Kecerdasan Buatan (AI)

Perkembangan kecerdasan buatan (AI) yang pesat telah memicu perdebatan tentang masa depan profesi guru. Pertanyaan fundamental yang muncul adalah: akankah guru tergantikan oleh AI? Analisis menunjukkan bahwa meskipun AI dapat menggantikan beberapa fungsi guru seperti memberikan informasi, menilai tugas, atau memberikan umpan balik dasar peran guru sebagai pendidik holistik tidak dapat sepenuhnya digantikan.

Guru memiliki peran unik yang tidak dapat direplikasi oleh AI, termasuk:

a. Membangun hubungan manusiawi: Guru membangun ikatan emosional dan kepercayaan dengan siswa, memberikan dukungan moral dan motivasi yang tidak dapat diberikan oleh mesin.
b. Menjadi teladan: Guru memberikan contoh perilaku, nilai, dan etika melalui interaksi langsung dengan siswa.
c. Mengelola dinamika kelas: Guru memahami nuansa sosial dan emosional di dalam kelas, mampu menyesuaikan pendekatan berdasarkan situasi yang kompleks dan dinamis.
d. Mengembangkan kreativitas dan pemikiran kritis: Guru merancang pengalaman belajar yang menantang dan mendorong siswa untuk berpikir kritis dan kreatif tugas yang membutuhkan pemahaman kontekstual yang mendalam.

4. Kompetisi Global vs Lokal (Glokalisasi): Mempertahankan Jati Diri Budaya Indonesia

Tantangan glokalisasi menyeimbangkan tuntutan global dengan pelestarian identitas local menjadi isu sentral dalam pendidikan Indonesia. Di tengah gempuran budaya populer asing seperti Westernisasi dan *Korean Wave*, sekolah memiliki tanggung jawab untuk mempertahankan dan memperkuat jati diri budaya Indonesia.

Pendidikan multikultural dan penguatan karakter berbasis nilai-nilai Pancasila menjadi strategi utama dalam menghadapi tantangan ini. Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) dan 8 Dimensi Profil Lulusan dirancang untuk membentuk peserta didik yang tidak hanya kompetitif secara global, tetapi juga memiliki akar budaya yang kuat dan identitas kebangsaan yang kokoh.

5. Krisis Mental dan Kesejahteraan Psikologis

Krisis kesehatan mental di kalangan pelajar dan pendidik telah menjadi alarm yang mengkhawatirkan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyoroti adanya peningkatan signifikan siswa yang berpikir dan mencoba bunuh diri dalam tujuh tahun terakhir, sehingga diperlukan upaya mengatasi isu ini di lingkungan keluarga dan sekolah.

Berdasarkan data *Global School-Based Student Health Survey* (GSHS), persentase siswa yang berpikir ingin mengakhiri hidup meningkat 1,6 kali lipat, dari 5,4 persen pada 2015 menjadi 8,5 persen pada 2023. Sementara itu, persentase siswa yang mencoba mengakhiri hidup meningkat 2,7 kali lipat, dari 3,9 persen pada 2016 menjadi 10,7 persen pada 2023. Data KPAI serta laporan kesehatan mental berbasis daring Kemenkes Healing119.id menemukan faktor utama pemicu keinginan bunuh diri pada anak adalah pengasuhan dan konflik keluarga (24-46 persen), perundungan (14-18 persen), masalah psikologis (8-26 persen), dan tekanan akademik (7-16 persen).

Menanggapi krisis ini, sembilan kementerian dan lembaga telah menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Kesehatan Jiwa Anak pada tanggal 5 Maret 2026 untuk mengatasi berbagai isu tersebut mulai dari rumah tangga dan sekolah. Upaya edukasi, sosialisasi, pencegahan, serta skrining terus didorong di sekolah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama.

6. Kebijakan Merdeka Belajar sebagai Respons Global

Kebijakan Merdeka Belajar merupakan respons strategis pemerintah Indonesia terhadap tuntutan global dan ketimpangan pendidikan nasional. Kebijakan ini bertujuan untuk memerdekakan guru dan siswa dalam berpikir dan berekspresi, sejalan dengan semangat Ki Hajar Dewantara yang menekankan pentingnya kebebasan dalam pendidikan. Penelitian oleh Farid Abdullah, Iwan Zahar, dan Indina Tarjiah (2023) menunjukkan bahwa kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) masih berpijak pada filsafat pendidikan Paulo Freire tentang kemerdekaan belajar, meskipun implementasinya menghadapi berbagai dinamika dan tantangan (Abdullah, Zahar, & Tarjiah:2023).

Kurikulum Merdeka memiliki tiga ciri utama: pembelajaran berbasis proyek yang fokus pada pengembangan *soft skill* dan karakter sesuai profil pelajar Pancasila; materi esensial yang memberikan waktu bagi siswa untuk memahami konsep secara menyeluruh; dan fleksibilitas guru untuk melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai kemampuan peserta didik.

Penelitian oleh Wisnu Widjanarko dan kolega (2023) tentang persepsi pengelola program studi ilmu komunikasi se-Indonesia terhadap kebijakan MBKM menunjukkan bahwa 81,9% pengelola program studi meyakini program ini membantu mahasiswanya siap untuk berdaya saing setelah lulus, dan 86,9% program studi telah memfasilitasi hak mahasiswa untuk belajar di luar kampus dengan model MBKM (Widjanarko, Ayuningtyas, Yuliati, Adhriati, & Istiyanto:2023). Namun, terdapat dinamika persepsi pada pengelola program studi, khususnya terkait dengan konversi kredit mata kuliah dalam konteks capaian pembelajaran (Widjanarko et al.:2023).

Hastangka dan Hidayah (2023) mengidentifikasi berbagai persoalan dan tantangan dalam implementasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, termasuk kesiapan institusi, sumber daya manusia, dan sistem pendukung (Hastangka & Hidayah:2023). Namun, implementasi Kurikulum Merdeka menghadapi tantangan

besar, terutama di daerah 3T. Keterbatasan infrastruktur, rendahnya kompetensi guru, fasilitas digital yang tidak memadai, dan distribusi guru yang tidak merata menjadi hambatan serius.

Studi Kasus: Dampak Penggunaan ChatGPT/AI terhadap Kemampuan Menulis dan Berpikir Kritis Siswa di Indonesia

> Penggunaan ChatGPT dan kecerdasan buatan generatif lainnya telah menjadi fenomena yang mengubah cara siswa belajar dan mengerjakan tugas. Dampaknya terhadap kemampuan menulis dan berpikir kritis siswa di Indonesia menjadi perhatian serius bagi pendidik dan pembuat kebijakan.

Dampak Positif

> Penggunaan AI dapat meningkatkan akses siswa terhadap informasi dan membantu mereka memahami konsep-konsep yang sulit. ChatGPT dapat berfungsi sebagai tutor pribadi yang memberikan penjelasan, contoh, dan umpan balik instan. Dalam konteks penulisan, AI dapat membantu siswa dalam menyusun kerangka tulisan, mencari referensi, atau memperbaiki tata bahasa, sehingga memungkinkan mereka untuk fokus pada pengembangan ide dan analisis.

Dampak Negatif

> Kekhawatiran utama adalah potensi ketergantungan siswa pada AI, yang dapat menghambat pengembangan kemampuan berpikir kritis dan menulis mandiri. Risiko plagiarisme dan pengurangan orisinalitas dalam karya siswa juga meningkat. Selain itu, penggunaan AI yang tidak kritis dapat mengurangi kemampuan siswa untuk mengevaluasi sumber informasi dan membangun argumen secara independen.

Tantangan bagi Guru

> Guru menghadapi tantangan untuk mendeteksi penggunaan AI dalam tugas siswa dan merancang penilaian yang tidak dapat dengan mudah diselesaikan oleh AI. Hal ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara bantuan teknologi dan interaksi manusia dalam pembelajaran.

Strategi Mengatasi

> Pendekatan yang konstruktif meliputi: mengintegrasikan literasi AI ke dalam kurikulum sehingga siswa memahami cara menggunakan AI secara etis dan kritis; merancang tugas yang menuntut pemikiran kritis dan kreativitas tingkat tinggi; mengembangkan keterampilan menulis melalui proses yang melibatkan umpan balik dari guru dan teman sebaya; serta terus menekankan pentingnya orisinalitas dan integritas akademik.



Daftar Pustaka

Abdilah, Z. (2025). Pernyataan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMP Muhammadiyah 1 Alternatif Kota Magelang. *Muhammadiyah Jateng*.

Abdullah, F., Zahar, I., & Tarjiah, I. (2023). Refleksi Kritis 'Merdeka Belajar-Kampus Merdeka' dan Tantangannya. *Formil: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, Universitas Esa Unggul.

Allman, P. (2013). Lessons from Marx. In *Education and the Reproduction of Capitalism*. Palgrave Macmillan.

American Sociological Association. (2023). Differential Outcomes and Socialization. *Teaching Resources and Innovations Library for Sociology*.

(Anonim. 2025). Gender, Critical Pedagogy, and Textbooks: Understanding Teachers' (Lack of) Mediation of the Hidden Curriculum in the EFL Classroom. *Language Teaching Research*, 29(7), 3143-3169.

Anyon, J. (1980). Social Class and the Hidden Curriculum of Work. *Journal of Education*, 162(1), 67-92.

Aprillia, A. A., & Rizqiani, A. F. (2023). *Keterampilan Sosial dan Pengaruh Lingkungan*. Universitas Mataram.

Ashizawa, S., & Neubauer, D. E. (Eds.). (2023). *Student and Skilled Labour Mobility in the Asia Pacific Region: Reflecting the Emerging Fourth Industrial Revolution*. Palgrave Macmillan.

Beyer, L. E., & Liston, D. P. (1996). *Curriculum in Conflict: Social Visions, Educational Agendas, and Progressive School Reform*. Teachers College Press.

Blumer, H. (1969). *Symbolic Interactionism: Perspective and Method*. University of California Press.

Bullough, R. V., Jr. (2021). Of What Do I Know? Self and Self-Study. *Studying Teacher Education*, 17(1), 1-15.

Bunikowska, J., & Suero Montero, C. (2022). *How to Promote Students' Role as Protagonists in their Schools as Drivers of Change Influencing Local and Virtual Communities and Becoming Global Agents of Change?* [Laporan Penelitian Proyek Erasmus+ Schools as Drivers of Change]. Zenodo.

Ciciolla, L., Curlee, A. S., & Karageorge, J. (2017). When Mothers and Fathers Are Seen as Disproportionately Valuing Achievements: Implications for Adjustment Among Upper Middle Class Youth. *Journal of Youth and Adolescence*, 46(5), 1057-1075.

Coleman, J. S. (1990). *Foundations of Social Theory*. Harvard University Press.

Coombs, P. H., & Ahmed, M. (1974). *Attacking Rural Poverty: How Nonformal Education Can Help*. Johns Hopkins University Press.

Demirdağ, M. F. (2025). The place of the concepts of cultural change and socialization in educational anthropology. *Din Sosyolojisi Araştırmaları*, 5(9), 69–83.

Dewantara, K. H. (1977). *Pendidikan*. Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa.

Dewi, I. G. A. T. P., Lasmawan, I. W., & Kertih, I. W. (2024). Implementasi Pendidikan Multikultural melalui Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar. *Jurnal Pembelajaran, Bimbingan, dan Pengelolaan Pendidikan*, 4(12), 26. Universitas Negeri Malang.

Durkheim, E. (1956). *Education and Sociology*. Free Press.

Easton, C. (2026). Teaching Evolution in Schools: A Thin Comprehensive Liberal Approach. *Journal of Philosophy of Education*, Oxford University Press.

Geertz, C. (1973). *The Interpretation of Cultures*. Basic Books.

Gina, F. V. (2023). Peran Siswa untuk Pembangunan Sosial Budaya di Indonesia. *Bobo.ID*, 24 Oktober 2023.

Golovashina, O. V. (2024). Pedagogical Ideals and School Practices: Émile Durkheim's Insights for Citizen Education in Contemporary Russia. In *Philosophical Reflection on Historiographical and Prospective Tasks of Contemporary Public Law* (pp. 167-181). Institute of Philosophy and Law, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences.

Hamid, R. Z., Nurbaeti, N., Kasim, M., & Usman, A. U. (2025). Menelaah fenomena pendidikan luar sekolah dalam ilmu antropologi: Kajian kritis enkulturasi, kekuasaan, dan proses pelestarian budaya. *Haumeni Journal of Education*, 5(3), 359–366. https://doi.org/10.35508/haumeni.v5i3.26726

Hasan, (2006). Syarat-syarat Kelembagaan Pendidikan Islam yang Efektif. Dalam *Pengembangan Budaya Mutu Sekolah Unggul, Berakhlak dan Berprestasi*. Universitas Terbuka.

Hasanuddin. (2024). Konsep Kebijakan dan Implementasi Pendidikan Multikultural di Indonesia. *EDUCASIA: Jurnal Pendidikan, Pengajaran, dan Pembelajaran*, 9(1), 31-43.

Hastangka & Hidayah, Y. (2023). Kebijakan dan Manajemen Pendidikan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka: Persoalan dan Tantangan. *Jurnal Muara Pendidikan*, 8(1), 1-16.

Hidayat, M. T. (2024). Dosen PGSD UNUSA Soroti Topik-topik dalam Kurikulum Perlu Dibenahi. *UNUSA*.

Homans, G. C. (1961). *Social Behavior: Its Elementary Forms*. Harcourt, Brace & World.

Jarvis, P. (2006). *Towards a Comprehensive Theory of Human Learning*. Routledge.

Julianto, Haritni, S., & Marpaung, V. (2024). Bullying Behaviour Intensity Reviewed from the Perception of School Climate on High School Students. *PSIKOSTUDIA: Jurnal Psikologi*, Universitas Mulawarman.

Kemendikbudristek. (2024). *Kebijakan Merdeka Belajar*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.

Kompas. (2025). Kurikulum yang Dimakan Usia. *Kompas.id*.

Kurniawati, D. (2026). Merdeka Belajar as a Cultural Project: Values and Tensions in Indonesia's Education Reform. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 32(1), 45-62.

Lestari, E. (2023). *Analisis etnosains seni anyaman dan budaya betangas di Muaro Jambi sebagai sumber belajar sains* [Skripsi, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi].

Madan, A. (2014). Max Weber's Critique of the Bureaucratisation of Education. *Contemporary Education Dialogue*, 11(1), 95-113.

Maisaroh, I., Sari, S. R., Purwanti, E., & Alhummaira, S. (2026). The McDonaldization of Merdeka Belajar: How Globalized Standardization is Quietly Erasing Indigenous Indonesian Pedagogies. *International Journal of Educational Development*, 25(1), 12-28.

Marx, K., & Engels, F. (1970). *The German Ideology*. International Publishers.

Masumbauw, Y. (2024). SMPN I Sorong Terapkan Program Agen Perubahan. *ANTARA News Papua Barat*.

Merton, R. K. (1968). *Social Theory and Social Structure*. Free Press.

Morris, C. (2026). *Re-Imagining AI for the Social Ecology of Learning* [Disertasi Doktoral]. MIT Media Lab.

Mu'ti, A. (2026). Dorong Kampus Muhammadiyah Mengembara Ilmu hingga Tingkat Global. *Muhammadiyah.or.id*, 18 Juni 2026.

Mulyadi. (2009). Pengembangan Budaya Mutu Madrasah menurut Teori Block Ice Lewin. *Jurnal Psikoislamika*, 6(1), 107-108. UIN Maliki Malang.

Mulyangga, D., Jagad, M. A. B., Cahyani, V. R., & Ayundasari, L. (2025). Kearifan lokal sebagai sumber daya untuk membangun kebhinekaan peserta didik. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 3(1), 226–232. https://doi.org/10.17977/um084v3i12025p226-232

Nursanti, N., Wilodati, W., & Komariah, S. (2023). Pendidikan informal sebagai upaya pelestarian perkawinan endogami (Studi kasus di Desa Adat Tenganan Pegringsingan, Bali). *Jurnal Paedagogy*, 10(3), 733–745. https://doi.org/10.33394/jp.v10i3.7445

Oktaviani, S. (2026). *Penerapan Pendidikan Nilai Karakter Peduli Sosial dalam Penguatan Budaya 5S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan, Santun) pada Materi Kolaborasi Budaya di Mata Pelajaran PPKn* [Skripsi]. Universitas Labuhanbatu.

Organisation for Economic Co-operation and Development [OECD]. (2019). *PISA 2018 Results: Combined Executive Summaries*.

Peneliti Internasional. (2025). Exploring the Role of Artificial Intelligence in Shaping Students' Social Skills. *International Conference on Research in Education and Science (ICRES)*. ERIC.

Peneliti. (2020). Simbol dan Pemaknaan dalam Model Interaksi Guru terhadap Siswa: Pendekatan Interaksionisme Simbolik G.H. Mead. *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Kependidikan.*

Pojok Satu. (2025). Skor PISA Merosot, Nilai Matematika TKA 2025 Jeblok, Ada Apa dengan Fondasi Pendidikan Kita? *Pojok Satu*, 28 November 2025.

Pramesti, G. (2024). The Effect of Online and Face-to-Face Active Learning on The Students' Social Skills in The Post-Pandemic. *Al-Khwarizmi: Jurnal Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam*, 12(2), 95–108. IAIN Palopo.

Prasetiyo, S. H., & Purwoto, L. (2025). Pengaruh Iklim Sekolah dan Pemantauan Orang Tua terhadap Perilaku Perundungan Pelajar. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 10(1), 66-68.

Pusmendik. (2024). Pendataan Sekolah Sampel PISA 2025. *Buletin Pusat Asesmen Pendidikan*, Kemdikbudristek.

Quinlan, A., & Curtin, A. (2017). Exploring Connections and Disconnects Between Identity and Literacy for a Group of Adolescents. *Irish Educational Studies*, 36(4), 1-18.

Rahmawati, T. (2024). *Pemanfaatan media pembelajaran berbasis kearifan lokal di sekolah dasar daerah pedesaan* [Skripsi, Universitas Pendidikan Indonesia].

Ritzer, G. (2011). *Sociological Theory* (8th ed.). McGraw-Hill.

Ritzer, G. (2011). *Sociological Theory* (8th ed.). McGraw-Hill.

Shinta, J., & Albina, M. (2024). Pendidikan Multikulturalisme untuk Mewujudkan Harmoni Sosial. *Adidaya: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(3), Politeknik Negeri Ketapang.

Song et al. (2025). Experimental Study on AI Chatbot vs Peer Interaction in Research Proposal Writing. Dalam *Exploring the Role of Artificial Intelligence in Shaping Students' Social Skills*. International Conference on Research in Education and Science (ICRES).

Sumarno, A., Lusiana, R., & Rahayuningtyas, S. (2024). Implementasi Kurikulum Merdeka di Tengah Degradasi Moral Guru. *Jurnal Riset Pendidikan*, 12(2), 145-158.

Sun, D., Looi, C.-K., Yang, Y., & Jia, F. (2025). Exploring Students' Learning Performance in Computer-Supported Collaborative Learning Environment During and After Pandemic: Cognition and Interaction. *British Journal of Educational Technology*, 56(1), 128-149.

Suryadi, A. (2025). Weber's Bureaucracy in Modern Educational Organizations: A Literature Review. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 8(1), 67-82.

Susilo, M. J., & Daud, N. B. A. (2026). Integrasi Kompetensi Abad 21 dalam Kurikulum Pendidikan Agama Islam: Kajian Literatur. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 9(2).

Tamsir, K. (2022). *Sosialisasi dan Pembentukan Kepribadian*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Utomo, J., & Mutmainnah, I. (2024). Teknik etnografi dalam pembelajaran PPKn berbasis budaya lokal dan kebangsaan pada siswa sekolah menengah. *Prosiding Seminar Nasional PPKn*, Universitas Terbuka.

Vardia, M. A., & Nurdibyanandaru, D. (2018). Pengaruh Pola Asuh (Authoritative, Authoritarian, Permissive, dan Negligent) dan Adversity Quotient terhadap Motivasi Berprestasi pada Siswa SMA Taman Siswa Malang. *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan*, 7(5), 8-28.

Vouteau, S. (2018). *Négligence des relations sociales et interpersonnelles dans cette conception de*. Université de Nantes.

Wasiun. (2025). Pernyataan Kepala SMP Muhammadiyah 1 Alternatif Kota Magelang. *Muhammadiyah Jateng.*

Weber, M. (1947). *The Theory of Social and Economic Organization*. Free Press.

Widjanarko, W., Ayuningtyas, F., Yuliati, Adhriati, L., & Istiyanto, S. B. (2023). Persepsi Pengelola Program Studi Bidang Ilmu Komunikasi Se-Indonesia tentang Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. *Jurnal APiK*, Universitas Pakuan.

Wijayanto, S., Purwandari, S., & Widanarti, N. I. (2025). Membongkar Kurikulum Tersembunyi: Studi Fenomenologis tentang Nilai Keadilan dan Bias Gender di Sekolah Dasar. *Journal of Basic Education Research*, Universitas Muhammadiyah Magelang.

Wilcox, K. (1982). *The Ethnography of Schooling: Implications for Educational Policy-Making*. ERIC Document Reproduction Service. (ED199809)

Zamroni. (2016). Kultur Sekolah dan Peningkatan Mutu Pendidikan. *Al-Rosikhun: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Universitas Islam Negeri Malang.



TENTANG PENULIS

Indrayanto, Ph.D. adalah seorang pendidik yang telah aktif di dunia akademik sejak awal tahun 2000-an. Pria kelahiran Bengkulu, 27 Februari 1972 ini menunjukkan dedikasi tinggi dalam membagikan ilmu pengetahuan, meskipun jabatan fungsional Lektor baru diraihnya pada tahun 2019. Perjalanan karir akademiknya dimulai dari posisi sebagai dosen luar biasa di UIN Raden Fatah Palembang, kemudian berkembang sebagai dosen tetap di IAIN Curup (2017-2018), dan selanjutnya di Universitas Pat Petulai Rejang Lebong, Bengkulu.

Di samping aktivitas akademisnya, penulis juga aktif dalam berbagai organisasi, baik di dalam maupun luar negeri. Pengalaman organisasinya mencakup jabatan strategis sebagai Kepala Departemen Research dan Publikasi pada *Eurasian Research Institute* (ERS) Wilayah Rusia, Ketua Bidang Penelitian dan Publikasi pada ICMI Wilayah Rusia dan Belarusia, Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Wilayah Rusia dan Belarusia, serta Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Wilayah Hyderabad India, selain keterlibatan aktif dalam berbagai organisasi pemuda dan kemasyarakatan lainnya.

Pengalaman organisasi yang luas ini turut mendukung kapasitas kepemimpinannya dalam dunia akademik. Hal ini terbukti dengan dipercayainya beliau untuk memegang berbagai jabatan struktural penting, seperti Kepala LPPM dan LPM, hingga puncaknya memimpin almamaternya sebagai Rektor Universitas Pat Petulai untuk periode 2021-2025. Saat ini, beliau aktif membangun visi

pendidikan sebagai Dekan FKIP dan Kepala LPPM di Universitas Dharma Indonesia.

Sebagai penulis yang produktif, telah banyak karya lahir dari pemikirannya, baik dalam bahasa Indonesia maupun Inggris. Di antara buku-buku yang telah diterbitkannya adalah *Metodologi Penelitian bagi Pemula* (2015), *Metodologi Penelitian* (2024), *Pengantar Administrasi Pendidikan* (2029), serta beberapa buku lainnya di bidang hukum dan pendidikan. Pemikiran dan hasil penelitiannya juga telah dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah, baik tingkat nasional (Sinta) maupun internasional bereputasi (Scopus).

Di balik kesibukan struktural dan produktivitas menulisnya, passion dalam mengembangkan ilmu pengetahuan tidak pernah pudar. Buku yang ada di tangan pembaca ini adalah wujud terbaru dari pemikiran dan kepeduliannya untuk menjembatani dunia hukum dengan tantangan dan peluang di era digital. Seorang suami dan ayah dari tiga orang anak, kehidupan keluarganya menjadi penyeimbang dari dinamika dunia akademik yang dijalaninya.